

الجريمة وعلاقتها بالأسرة في منظور الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الليبي

(دراسة تحليلية مقارنة)

أطروحة علمية

مقدمة لاستيفاء بعض الشروط للحصول على درجة الدكتوراة في الشريعة والقانون

بكلية الدراسات الإسلامية جامعة سونان أمبيل

الإسلامية الحكومية



إعداد الطالب

محمد حامد محمد الأحيرش

رقم التسجيل : NIM. F43416080

كلية الدراسات العليا

جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية

سورابايا

2019م

إقرار رسالة طالب

أنا الموقع أدناه ، وبياناتي كالاتي

الاسم بالكامل : **محمد حامد محمد الأحيرش** . رقم التسجيل : **NIM. F43416080**

أقر بأن هذه الرسالة التي حضرتها لتوفير شرط الحصول على درجة الدكتوراة في كلية الدراسات العليا قسم الشريعة والقانون بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا .

تحت عنوان : **الجريمة وعلاقتها بالأسرة في منظور الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الليبي**

(دراسة تحليليه مقارنة)

قد حضرتها وكتبتها بنفسي وما زورتها من إبداع غيري أو تأليف الآخر وإذا ادعى أحد مستقبلاً أنها من تأليفه وتبين أنها فعلاً ليست من بحثي، فأنا أتحمّل المسؤولية على ذلك ولن تكون المسؤولية على المشرف أو على كلية الدراسات العليا بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا .

حررت هذا الإقرار بناءً على رغبتني الخاصة ولم يجبرني أحد على ذلك .

الطالب المقر/ محمد حامد محمد الأحيرش

التوقيع

بتاريخ 11 / 2 / 2019م.

موافقة المشرفين

تمت الموافقة من طرفي المشرفين على هذه الأطروحة التي قدمها الطالب محمد
حامد محمد الأحيرش، في سورابايا. / / 2018م

المشرف

الأستاذ الدكتور الفاضل

PROF.DR.H.YASID.MA.LLM



المشرف

الدكتور الفاضل

DR.H.M.Lathoif Ghozali.LC. MA



الاعتماد من لجنة المناقشة

تمت مناقشة هذه الأطروحة المقدمة من الطالب محمد حامد محمد الأحرش في المناقشة

المفتوحة في / / 2018 أمام لجنة المناقشة التي تتكون من:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| (رئيساً ومناقشاً) | 1. الأستاذ الدكتور حسين عزيز |
| (كاتباً ومناقشاً) | 2. الدكتور أحمد إمام ماوردي |
| (مناقشاً رئيسياً) | 3. الأستاذ الدكتور فيصل الحق |
| (مشرفاً ومناقشاً) | 4. الأستاذ الدكتور يزيد |
| (مناقشاً رئيسياً) | 5. الأستاذ الدكتور السيد عقيل حسين المنور |
| (مناقشاً رئيسياً) | 6. الأستاذ الدكتور أحمد زهرا |
| (مشرفاً ومناقشاً) | 7. الدكتور محمد لطائف غزالي |

ووافقت اللجنة على قبول الأطروحة.

سورابايا، / / 2018م

مدير الكلية



الأستاذ الدكتور حسين عزيز الماجستير

رقم التوظيف: 195601031985031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :

NIM :

Fakultas/Jurusan :

E-mail address :

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

.....
.....
.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(.....)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Mohamed Hamed Mohamed Alehirish, 2019. *Kejahatan dan hubungannya dengan keluarga menurut perspektif fiqih islam dan undang pidana Negara Libya (Studi Analisis komparatif)*, Tesis. Jurusan Syariah dan Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing I.Dr: Prof..H. Yasid.MA.MIl. II : Dr. H.M.Lathoif Ghozali. LC. MA

Kata Kunci : KDRT, Sanksi, Hukum Islam, Hukum Pidana Libya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan mempelajarinya secara detail, terbuka dan independen menurut sudut pandang fiqih islam dan hukum pidana Libya, dengan tujuan untuk mereview dan mengembangkan hukum ini, agar tidak bertentangan dengan hukum Islam dan menentukan kedudukan hukum keluarga Libya terhadap kejahatan tersebut. Serta untuk menyoroti dan menentukan aspek yurisprudensi dan hukum melalui beberapa kajian pada sanksi hukum yang dikenakan oleh pembuat hukum Libya untuk kejahatan tersebut dan untuk mengkomparasikan. dan Pertanyaan penelitiannya adalah :1) Bagaimana kejahatan terkait dengan keluarga dalam perspektif yurisprudensi Islam dan kuhp libya ? : 2) Bagaimana bisa hukuman untuk kejahatan ini membandingkan pendapat dengan ulama dalam hukum Islam dan kuhp libya ?

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, pengumpulan data melalui beberapa kitab referensi hukum Libya dan ensklopedia hukum pidana Libya. Sedangkan data yang berkaitan dengan hukum islam dikumpulkan dari beberapa kitab fiqih, kemudian peneliti menganalisis data tersebut dengan cara menampilkan data pada tiap tema, menganalisis, membahasnya dari segi hukum Libya dan pernyataan serta pendapat para ulama fiqih madzhab empat, kemudian mengkomparasikan dan menarik kesimpulan dari hal tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuat hukum Libya tidak jauh berbeda dari hukum Islam dalam hal pembuatan hukum kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) beserta sanksinya, meskipun berbeda pada beberapa kasus dengan dalih menjaga hak-hak manusia, keamanan dan stabilitas mereka, dan hal itu dikarenakan tidak adanya pengembangan serta penyesuaian hukum tersebut.

Adapun kedudukan hukum keluarga Libya tidak mengulas penganiayaan salah satu anggota keluarga dan penyalahgunaan mediator dan pendidikan secara ekplisit, akan tetapi melimpahkan hal tersebut ke hukum pidana, namun dalam beberapa permasalahan dan kasus tidak dikriminalisasi dan tidak dihukum, sedangkan hal tersebut adalah alat bantu, penguat argumen dan penjelas dari kondisi keluarga yang berlaku dalam hukum pidana. Dan membantu pengadil (hakim) dalam menentukan kondisi dan kesesuaian sebuah hukum terhadap kejahatan.

Kritik dari peneliti muncul ketika sebuah teori mengatakan bahwa hanya Hukum keluarga yang dapat mengatur hubungan yang muncul dari kenyataan bahwa manusia itu laki-laki atau perempuan, bahwa dia adalah suami atau duda atau absolut, atau bahwa dia penuh atau tidak lengkap, namun peneliti melihat bahwa teori ini tidak lengkap, dimana dia tidak menentukan ganjaran dan hukuman-hukuman apabila terjadi pelanggaran aturan tersebut. Peneliti menegaskan bahwa asumsi berdasarkan kriteria khusus pada saat terjadinya kejahatan ini diambil oleh KUHP Libya sebagai bukti. Oleh karena itu, teori peneliti melengkapi teori sebelumnya. Dengan demikian, teori peneliti saling melengkapi dengan teori sebelumnya. Dan bahwa kejahatan serta hukuman yang dikenakan pada mereka tidak setara menurut hukum Islam, dan tidak terbatas pada hukum keluarga saja.

ABSTRAK

Mohamed Hamed Mohamed Alehirish, 2019. *Crime and its Relation to the Family in the Perspective of Islamic Jurisprudence and the Libyan Penal Code (Comparative analytical study)* Thesis. Sharia and Law Department, Postgraduate Program of Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya. Advisor I: Dr: Prof..H. Yasid.MA.MIl. II : Dr. H.M.Lathoif Ghozali .LC. MA.

Keywords: Domestic violence, sanction, Islamic law, Libyan Criminal Law

The study aims at find out and analyze domestic violence, and study it in detail, openly and independently based on the Islamic main fiqh and Libyan criminal law in order to review and develop the law so it will not against Islamic law and.Furthermore, it aims to monitor and determine the jurisprudence aspect and the law by studying the law sanction set by Libyan law maker and compare it with Islamic law. As following the search questions :1) How are crimes related to families in the perspective of Islamic jurisprudence and the Libyan Penal Code? : 2) How can sanctions be compared to these crimes in terms of the opinions of scholars in Islamic jurisprudence and the Libyan Penal Code?

The researcher employs a descriptive analysis method and collects the data from Libyan law reference textbooks and criminal law encyclopedia. Data related with Islamic law are from several fiqh books. Then the researcher analyzes the data by representing them on each theme and reviewing them from the perspective of Libyan law and four main ulemas. The last steps are compare and draw the conclusion from the study.

The result shows that the Libyan law maker is in accordance with Islamic law in making law on domestic violence and its sanction. However, the implementation of the law is sometimes different in some cases due to some reasons such as maintaining human rights, safety and stability. The fact is caused by the lack of development and adjustment of the law.

The Libyan family law has no explicit explanation on domestic violence and mediator misuse, and it delegates them to criminal law. However, the explanation will help to strengthen the argument and clarify the family condition in criminal law. It also help judges to determine the condition and law adjustment to a certain crime. In some cases, the suspects are not brought to trial and punished.

The criticism of the researcher arises when a theory says that only the Family Law can regulate the relationship arising from the fact that man is male or female, that he is husband or widower or absolute, or that he is full or incomplete, but the researcher sees that this theory is incomplete, where it does not specify rewards and punishments in case of violation of the rule. The researcher asserts that the assumption based on the specific criteria at the time of the crime was taken by the Libyan Criminal Code as evidence. Therefore, theorist's theory complements the previous theory. Thus, the theory of researchers complement each other with previous theories. And that the crimes and punishments imposed on them are unequal according to Islamic law, and not limited to family law alone.

فهرس المحتويات

1	الباب الأول : الإطار العام والدراسات السابقة.....
1	أ. خلفية البحث : المقدمة
7	ب. مشكلة البحث.....
9	ج. أسئلة البحث.....
10	د. أهداف البحث
10	هـ. أهمية الموضوع
12	و. الدراسات السابقة
18	ز. حدود البحث
19	ح. تحديد مصطلحات البحث
22	ط. نظرية البحث
23	ي . هيكل البحث
25	الباب الثاني : الإطار النظري.....
27	أ. المبحث الأول / النظريات المعاصرة والمتعلقة بموضوع البحث
27	1_ تكامل وصلابة وتماسك الأبوين.....
28	2_ التزام الأبوين بأصول التربية السليمة وفق تعاليم الإسلام
	3_ استواء الوضع الاقتصادي للأسرة واعتدال حجمها.....
30	

34	4_ التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للجريمة على الأسرة
34	أ. التأثيرات المباشرة للجريمة على الأسرة.....
41	ب. التأثيرات الغير مباشرة للجريمة على الأسرة
48	5_ الأسرة ونظامها في الإسلام.....
49	أ. حماية الإسلام للأسرة
51	ب. التفسير النظري والإسلامي لعلاقة الأسرة بالجريمة.....
53	ب. المبحث الثاني / الطبيعة القانونية والشرعية للجريمة
53	1_ الطبيعة القانونية للجريمة
55	2_ الجريمة ونشأتها عند الإسلام والقانون الليبي
56	أ. الجريمة في القانون الليبي.....
56	ب. تاريخ نشأة الجريمة في القانون الليبي.....
58	ج. الجريمة في الإسلام
60	د. تاريخ نشأة الجريمة في الإسلام.....
61	هـ. أركان الجريمة من حيث الشرع والقانون.....
62	(1)_ الجريمة بحسب ركنها المادي.....
64	(2)_ الجريمة بحسب ركنها المعنوي.....
65	(3)_ الجريمة بحسب ركنها الشرعي.....
66	(4)_ الجريمة في الفقه الإسلامي.....

66	و. مدى سلطة ولي الأمر في التجريم عند جمهور فقهاء
71	ج. المبحث الثالث / العقوبة الشرعية عند الفقهاء والأسس التي تحكمها
71	1_ العقوبة الشرعية في الاصطلاح الفقهي
72	2_ الغاية من العقوبة عند الفقه الإسلامي
74	3_ أنواع العقوبة الشرعية
77	4_ الأسس التي تحكم العقوبة الشرعية وشروطها
81	5_ الظروف المشددة والمخففة للعقوبات عند الإسلام والقانون الليبي
81	أ. الظروف المشددة والمخففة للعقوبات عند الإسلام
89	ب. الظروف المشددة والمخففة للعقوبات في القانون الليبي
94	6_ السلطة التقديرية للقاضي في تقدير العقوبات وفق القانون الليبي
96	الباب الثالث : منهج البحث
96	أ. نوع البحث ومنهجه
101	ب. مصادر جمع البيانات
106	ج. أدوات جمع البيانات
106	د. أسلوب جمع وتحليل البيانات
108	هـ. الخطوات المتعلقة بمنهج الكتابة
110	الباب الرابع : عرض البيانات وتحليلها
110	أ. المبحث الأول / جرائم الأسر في منظور قانون العقوبات الليبي والفقه الإسلامي

- أ. جدول مقارنة لمحل تلك العقوبات بين القانون الليبي والفقهاء الإسلاميين 187
- ب. مناقشة الباحث للتحليل والنقد لتلك العقوبات 188
- 3_ عقوبة جرائم سوء استعمال وسائل الإصلاح أو التربية عند القانون الليبي 191
- 4_ عقوبة جرائم سوء استعمال وسائل الإصلاح أو التربية عند الفقهاء الإسلاميين 196
- أ. جدول مقارنة لمحل تلك العقوبات بين القانون الليبي والفقهاء الإسلاميين 201
- ب. مناقشة الباحث للتحليل والنقد لتلك العقوبات 201
- 5_ عقوبة جرائم إساءة معاملة أفراد الأسرة بين القانون الليبي والفقهاء الإسلاميين 203
- 6_ آراء العلماء والمفكرين في مسألة العقوبة في تلك الجرائم 208
- الباب الخامس : النتائج والتوصيات** 212
- أ. نتائج البحث 212
- ب. النظرية المترتبة على النتيجة 215
- ج. التوصيات 218
- د. قائمة المصادر والمراجع 220
- هـ. ملحق البحث : بعض الأحكام الصادرة عن محكمة سبها الجزئية A
- و. السيرة الذاتية للباحث L

2_ لما كان فقه العقوبات في الجرائم هو الحامي لحياة الفرد والجماعة فيما يتعلق بأبدانهم، وأعراضهم، وأنسابهم، وأموالهم، وعقولهم، ودينهم، واستقرارهم، وأمنهم، اشتدت حاجة الناس إلى معرفة أحكامه حتى يكونوا على بينة من أمرهم فيما يتعلق بحفظ هذه الضرورات، ويرى الباحث بأن الأسس التي يقوم عليه النظام الإسلامي كفيلة بأن تقضي على العيوب التي تصاحب العقوبة الوضعية، كما هي كفيلة بأن توفر المجهودات التي تبذل لتخفيف أضرار هذه العقوبات والأموال الكثيرة التي تنفق في سبيل تنفيذها، وتظهر المشكلة الرئيسية هنا في العقوبات التعسفية التي لم يراعى فيها القانون الليبي المعايير الخاصة عند الحكم فيها، ولم يجعل للقاضي مرجع أساسي له في الحكم فيها، الا بتحديد حالة الجاني وقت ارتكاب الجريمة والوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه، وبذلك يظن الباحث ويعتقد بأن العقوبات من الأحكام التي لا تقبل السلطه التقديرية للقاضي في تحديدها وتطبيقها، وإنما بوجوب تحديد نصوص صريحه لكل جريمة فيها بما لا يتخالف مع الشريعة الإسلامية.

على هذا الأساس سيسرد الباحث رسالته في تلك الجرائم المتعلقة بالأسر، وتوضيح العقوبات التي سنها المشرع الليبي لها، ومقارنتها بما جاء في الفقه الإسلامي من حيث نوع الجرائم والعقوبات المفروضة عليها .

ج. أسئلة البحث

1. كيف تكون الجرائم المرتبطة بالأسر في منظور الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الليبي ؟

2. كيف تكون عقوبات تلك الجرائم مقارنةً بين آراء الفقهاء في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الليبي ؟

يتمنى من الله أن يوفق من قرء هذه الرسالة وعمل على أن يأخذ الجوانب الإيجابية فيها، بحيث يتم الاستفادة منها.

ب_ أن هذا البحث هو مساهمة للتعرف على أحكام قانون العقوبات الليبي في هذه الجرائم ومن ثم مقارنتها بالشريعة الإسلامية، بحيث تكون الأسر بدراية كاملة على ما يدور حولها من جرائم داخلية على كيانها وأسبابها وعواملها والآثار القانونية المترتبة عليها عند الشريعة والقانون الليبي.

ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة كونها محاولة لتحديد حجم ونمط أهم جرائم والعقوبات المترتبة عليها.

2_ الأهمية التطبيقية للموضوع :

أ_ يأمل الباحث من ناحية تطبيقية أن يلفت انتباه المسؤولين عن الأجهزة القضائية والتنظيمات الحقوقية والمؤسسات العلمية في الدولة الليبية وأن يقدم لهم دراسة مخصصة في هذه الجرائم تحليلاً وتفصيلاً وتطويراً ومعالجتها للقصور التي شابها قانون العقوبات الليبي، ومن ثم المساهمة في تطوير وتقنين معايير جديدة، تفصل القانون بشكل دقيق، وبما يتماشى مع الشريعة الإسلامية بشكل عام.

ب_ من ناحية تطبيقية أيضاً فإن الباحث يأمل من خلال هذه الدراسة أن يلفت انتباه الأسر والمقبلين على الزواج إلى أن هناك أفعال وسلوكيات صنفها المشرع الليبي إلى جرائم جنائية ترتكب داخل الأسر ضد الآخرين بطرق مادية ومعنوية يجب الانتباه لها وبذلك تكون هناك ضوابط قانونية وقضائية وشرعية في التعامل والحكم على مرتكبيها إذا ما تمت ارتكاب هذه الأفعال في ظل مجتمع يسوده قانون يحمي الأمن والاستقرار وتحكمه العادات والتقاليد.

4_ (الجرائم الواقعة على الأسرة) تناول هذا الكتاب الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حقوق الأولاد والتمثلة في حق الرعاية والعناية والحماية وضمن وسائل الصحة والحياة والتربية الخلقية وأسباب تحقيق الأمن والاستقرار داخل الأسر، وكيفية ضمان أسرة قوية متماسكة .²²

حيث لم يتطرق الكاتب الى القانون الليبي بشكل خاص في مسألة تلك الجرائم الواقعة على الأسر، ويظهر الفرق بين الدراسة التي قام بها الباحث والدراسة التي كتب فيها الكاتب في كون أن كل منهما جرائم واقعة على الأسر، غير أن الباحث أعتمد في رسالته على القانون الليبي من حيث استنباط وتحليل تلك الجرائم، وتحديد العقوبات المعنية فيها، وحيث أكتفي الكتاب بتحديد الجرائم فقط وتحليلها، دون النظر الى العقوبات المفروضة عليها، وهذا ما قام الباحث بالبحث فيه، والذي رأى بأن رسالته مكملة للكتاب الذي لم يحدد فيه العقوبات المعنية لكل جريمة واقعه داخل كيان الأسر.

5_ (الوسيط في أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي والتقنيات العربية المعاصرة) حاول الكاتب في هذا الكتاب بيان أحكام الزواج في الفقه الإسلامي بجميع مذاهبه واستعرض القوانين المعمول بها في بعض الدول العربية، مثل القانون المصري والسوداني والليبي والسوري، وبالوقوف على القانون الليبي الذي تطرق له الكاتب بشكل عام من خلال الأخذ بالاجتهادات الفقهية التي لم تقف عند الحكم الفقهي فقط، وإنما وقفت ووصلت الى ابراز آداب الإسلام في الحياة الزوجية، واستيفاء الحقوق والوفاء، بما يتحقق به المودة والرحمة، دون النظر الى الأحكام الجزائية من حيث الجزاءات المفروضة في مخالفة نظام تلك الاحكام .²³

يظهر الفرق في أوجه التشابه والاختلاف بين هذه الدراسة والدراسة التي سيبحث فيها الباحث كون أن هذه الدراسة مكملة من حيث إثبات بعض النظريات، لتحقيق

22 سعد عبد العزيز، الجرائم الواقعة على الأسرة (تونس : الدار التونسية، ط2، بدون تاريخ نشر) 39-40 .

23 أحمد الغزالي، الوسيط في أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي والتقنيات العربية المعاصرة، الجزء1 (مصر : دار النهضة العربية، 1999م) المقدمة وما يليها .

يجد الباحث أن جميع الدراسات السابقة تكلمت عن دور الأسرة في التصدي للجرائم ولم تتطرق على دراسة تلك الجرائم من حيث الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الليبي ونجد أن بعض الدراسات لم تكن العينة فيها متمثلة لمجتمع الدراسة، فمثلاً مدبولي اعتمد في دراسته على البيانات المتوفرة في ملفات الأحداث خلال الفترة 1392هـ، إلى 1400هـ، كذلك نجد أن عنوان دراسته هو تطور ملامح جناح الأحداث في المملكة العربية السعودية و أن دراسته اقتصرت على مدينة الرياض، وفيما يتعلق بأداة الدراسة التي استخدمها نجد قد استخدم أسلوب تحليل المضمون من واقع ملفات الأحداث كأداة رئيسة في البحث وكان الأجدى أن يختار عينة من مجتمع الدراسة ومن ثم استخدم الاستبانة أو المقابلة وذلك بهدف الوصول إلى دراسة علمية دقيقة، وكذلك نرى أن بعض الدراسات أهملت تحديد بعض مفاهيم الدراسة الرئيسية، وانفقت نتائج الدراسات على أن معظم الأسر من حيث الزوج والزوجة والأبناء المرتكبون للجرائم ينتمون إلى أسر مفككة.

ز. حدود البحث

يتحدد نطاق الدراسة في هذا البحث بالوقوف على الجرائم الأسرية عند قانون العقوبات الليبي " الجرائم العامة " لسنة 1953 ميلادي بتاريخ 23/ 9 الموافق 14 محرم 1373 هجري، في المواد التي سنها المشرع في الباب الثاني الفصل الأول منه وتحليلها وتفصيلها والوقوف على العقوبات المفروضة لها ما إذا ثم ارتكاب تلك الجرائم، ومن ثم مقارنتها بالفقه الإسلامي " المذاهب الأربعة " وبيان موقف قانون الأحوال الشخصية الليبي منها لسنة 1393 هجري، الصادر بتاريخ 19 رجب الموافق 19 أبريل 1984 ميلادي، وتعديلاته لسنة 1403 هجري، الصادرة بتاريخ 17 شعبان الموافق 29 أي النار لسنة 1993 ميلادي، و بما جاءت بها الشريعة الإسلامية في القرءان الكريم تطبيقاً لقوله تعالى ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ .²⁹

29 سورة الانعام - الآية : 38

العادلة، ومن ثم تصريف مصالح الناس في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة، في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقة بعضهم ببعض، وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة. وبالتالي تكون تلك الأحكام هي نفسها المنزلة من عند الله، وتختلف عن الفقه في الأحكام التي استخلصها الفقهاء من نصوصها الشرعية، وحيث ان هذه الأحكام قد تكون موافقة لها، فحينئذ يكون الفقه من الشريعة فيتفق الحكم الشرعي والحكم الفقهي. وقد يتنازع فيها الفقهاء فالمصيب منهم يكون قوله موافقا للشريعة، والذي لم يصب الحكم الشرعي يكون قوله داخلاً في دائرة الفقه ولكنه ليس من الشريعة بحال من الأحوال.³¹

31 حامد بن أحمد الرفاعي، شركاء لا أوصياء، سلسلة إصدارات لتعارفوا، العدد 21، ط2 (لبنان: بيروت، 1427هـ، 2006م) 3. وحيث أن أحكام الشريعة الإسلامية تستمد من القرآن، ومن السنة النبوية، ومن إجماع العلماء على حكم من الأحكام في عصر من العصور بعد وفاة النبي محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) مثل الإجماع على مبايعة أبي بكر بالخلافة، ومن القياس في إثباته حكم فرعي قياساً على حكم أصلي لعله جامعة بينهما؛ مثل إثبات جريمة إتلاف مال اليتيم بالحرق قياساً على جريمة إتلافه بالأكل، الثابت بالقرآن؛ بجامع الإتلاف في كل. بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة المختلف فيها مثل: الاستحسان، والمصالح المرسله، وسد الذرائع، والبراءة الأصلية، والعرف المستقر، وقول الصحابي، حيث لم يخالف نصاً شرعياً، ولم يوجد ما يخالفه من قول صحابي آخر. أما عن المذاهب الفقهية الأربعة:

المذهب الحنفي: أسسه صاحبه الإمام أبي حنيفة النعمان عام "80 - 150هـ" ويشمل على تحقيق مناهج شيوخ المذهب ولم يكن مقتصرًا على منهج صاحب المذهب، ونشأ هذا المذهب في مدينة الكوفة، ثم توسع حتى وصل بغداد، وذلك بمباركة ومؤازرة الدولة العباسية، وهو مذهب يعتمد على الأصول التقليدية والقياس والاستحسان والعرف وأقوال الصحابة وشرع الأمم السابقة، وشدد على اعتماد الأصول العقلية وضوابط الحديث نظراً لنشأته في بيئة ازدهرت بالحراك السياسي والمذاهب العقلية والفلسفية.

المذهب المالكي: صاحبه الإمام مالك بن أنس تأسس المذهب في الحجاز المدينة المنورة عام "93 - 179هـ" ويعتمد على الأصول المتفق عليها والقياس وإجماع الصحابة، وعلى عمل أهل المدينة، وعدم جواز الخروج عن الحاكم الظالم الجائر. ومن أشهر كتب المذهب المالكي "الموطأ" للإمام مالك. توسعت قاعدته في الحجاز والمدينة المنورة، ثم انتشر سريعاً في شمال إفريقيا والأندلس ومصر والعراق وله آراء واجتهادات تفردها بها منهم من وافقه ومنهم من خالفه فيها. ينظر محمد زكي الدين محمد قاسم، رجال ومناهج في الفقه الإسلامي "الأئمة الأربعة" (الكويت: بدون تاريخ نشر) 60.

المذهب الشافعي: مؤسسه الإمام محمد بن إدريس الشافعي تأسس في العراق بغداد عام "150 - 204هـ" ويعتد مذهباً وسطاً بين مذهب أبي حنيفة الذي يعتمد على الرأي، وبين مذهب مالك الذي يعتمد على الحديث، على حين يعتمد مذهب الشافعي في استنباطه واستدلاله على الأصول.

المذهب الحنبلي: مؤسسه الإمام أحمد بن حنبل تأسس في العراق بغداد عام "164 - 241هـ" ويرى صاحبه أنه يجب أن يقوم الفقه على النص من الكتاب والحديث، وأنكر على من سبقوه من أئمة الفقه أخذهم بالرأي واعتبر الحديث أفضل من الرأي، ومن أهم كتبه "المسند" الذي يحوي أربعين ألف حديث، ومن أشهر أتباع المذهب الحنبلي الذين قاموا بنشره ابن تيمية وابن القيم الجوزية. ينظر عبد الله بن علي صغير، سيرة أئمة المذاهب السنية وأصولهم الفقهية (السعودية: بدون تاريخ نشر) 6.

3_ الجريمة في منظور قانون العقوبات الليبي

كل جريمة في رأي قانون العقوبات الليبي يكون في مقابلها عقوبة وبالعقوبة تتميز قواعد هذا القانون عن غيره من القوانين الأخرى، سواء المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الأسر أو غيرها، إلا أن قانون العقوبات يشمل علاوة على الجرائم و العقوبات مجموعة من القواعد العامة التي تحكمها ضمن إطار مشترك مثل مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات التي يقرر فيها مبدأ " لا جريمة ولا عقوبة فيه إلا بنص " وبالتالي يحدد لنا عناصر وأركان كل جريمة، من حيث مبادئ المسؤولية الجزائية، وأسباب الإباحة فيها، وموانع العقاب لها، وسريانها من حيث المكان و الزمان، كما يشمل هذا القانون أيضا على جميع التشريعات الجزائية "العقابية" الخاصة و المكتملة له سواء كانت المتعلقة بالأسر أو غيرها، ويشير الباحث أخيرا إلى أن هذا القانون مقصور فقط على القواعد الموضوعية دون القواعد الشكلية أو الإجرائية .³²

4_ العقوبات المعنية في هذه الأطروحة

يقصد الباحث بكلمة عقوباتها في هذه الأطروحة، العقوبات الخاصة التي فرضها القانون الليبي، والتي يطبقها القضاء عن طريق محاكمة على من ثبت مسؤوليته عن الجريمة، أي بذلك يعتبر بأن أي أذى أو أثر قانوني يلحق به مقابل ما حققه من سلوك إجرامي أضرب به أو هدد بالضرر مصالح يحميها القانون عقاباً له لجزره

32 فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات (مصر : دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، 2001م) 9 . قانون العقوبات الليبي هو قانون الجرائم العامة لسنة 1953م، الصادر بتاريخ 23 / 9 الموافق 14 محرم 1373هـ، فيكون خير دليل لتوضيح ما ذكره الباحث آنفاً، فيضم هذا الأخير الجرائم والعقوبات المقررة لها، وكما أن المجتمع يكافح الجريمة بعدة وسائل أبرزها قانون العقوبات، وهو بذلك يشمل على عدة قواعد تحدد للأفراد السلوك الواجب والسلوك المخطور ويترتب على مخالفتها جزاءً معيناً، وأهم ما تختص به القاعدة الجنائية هو الجزاء الذي يتمثل في العقوبة غالباً والعقوبة هي نوع من المعاناة تفرضه الدولة على من ينتهك هذه القواعد ، تتمثل في تجريد الشخص من بعض الحقوق والمزايا، ويتم ذلك عن طريق السلطة القضائية، وباستخدام الدعوى الجنائية، وهو من فروع القانون العام، لأنه يحمي حقاً عاماً، وقد يلتبس الأمر عندما تقع الجريمة على أحد من الأفراد في حياته أو بدنه أو ماله، وينجلي الالتباس بأن الحماية الجنائية إنما تنصب أساساً على حق المجتمع في صيانة حياة الأفراد وسلامتهم وصيانة أموالهم، وأي اعتداء على أيّ من ذلك يعتبر اعتداءً على المجتمع نفسه.

تدخل تحت قانون الأحوال الشخصية لأنها تختص بأحوال الناشئين، غير أن قانون العقوبات الليبي جعل من تلك الجرائم جرائم جنائية داخلية تحت بنوده ومواده من حيث التنظيم والجزاءات المفروضة عليها، ولهذا السبب سيكمل الباحث تلك النظرية الأولى، ومن خلال ذلك سيعمل الباحث على الأخذ بالجرائم والعقوبات المفروضة عليها، والأخذ بالافتراضيات المبنية على المعايير الخاصة سواء كانت قانونية منها أو اجتماعية أو فقهية عند وقوع تلك الجرائم، وبذلك سيستند الباحث على أقوال الفقهاء في التحليل كون تلك الجرائم يأخذ بها قانون العقوبات الليبي كدليل لعدم مخالفة أحكامه للشريعة الإسلامية ولو تعددة أسباب فاعلها.

ي . هيكل البحث

بعدما قام الباحث بالتفكير والتأني والاطلاع، وصل الباحث إلى أن متطلبات الدراسة العلمية وطبيعة هذا الموضوع والغرض من بحثه تجعل من المناسب أن تكون الدراسة على النحو التالي : في الباب الأول تطرق الباحث في خلفية البحث عن موضوعه بشكل دقيق شارحاً ومفصلاً له، من حيث الجريمة وكونها عامل مهم لهذه الدراسة، ومن ثم إعطاء مفهوم عام عن الأسرة وصلتها بالجريمة من حيث العوامل المؤثرة فيها دون التطرق إلى العقوبات والجزاءات التي فرضتها الشريعة الإسلامية لها، ومن ثم التطرق لمشكلة البحث وأسئلته وأهدافه وأهميته النظرية والتطبيقية ومن ثم الدراسات السابقة المتعلقة به وحدوده ومصطلحاته المهمة.

أما عن الباب الثاني في الإطار النظري : تطرق الباحث فيه إلى الجانب النظري وجمع شتات الموضوع من جميع جوانبه، وتطرق الباحث فيه بدايةً بالتعريف بالنظريات القانونية والفقهية، ومن ثم التركيز على ثلاثة مقومات أساسية تركز عليها الأطروحة، متمثلة في مدى تكامل وصلابة وتماسك الأبوين، والتزامهما بأصول التربية السليمة وفق الإسلام، واستواء الوضع الاقتصادي للأسرة واعتدال حجمها، ثم

تناول الباحث بعض التأثيرات المباشرة والغير مباشرة للجريمة على الأسرة والتي من المحتمل أن تكون لها الدور الرئيسي في بيان أهم المعطيات الخاصة بموضوع الأطروحة، ومن ثم تناول الباحث الكيفية المتبعة لنظام الأسرة في الإسلام وكيفية حماية الإسلام لها، ومن ثم تفسير العلاقة بينها وبين الجريمة من جهة نظرية، وبينها وبين الجريمة من جهة إسلامية، ومن ثم تطرق الباحث الى الطبيعة القانونية للجريمة ومفهومها العام ومن ثم نشأتها وتاريخها وأركانها، ومن ثم تناول الباحث العقوبات بمفهومها عند فقهاء المذاهب الأربعة وأنواعها والأسس التي تحكمها وشروطها وأقسامها، و الظروف المشددة والمخففة لها وبيان مدى السلطة التقديرية للقاضي في تحديدها وأيضاً سلطته بوقف تنفيذها.

أما عن الباب الثالث في منهج البحث : حيث اشتمل على التعريف بالمنهج المستخدم في هذه الأطروحة وهو المنهج الوصفي التحليلي، ويشتمل أيضاً على مصادر جمع البيانات والتي قسمها الباحث إلى مصادر أولية أصلية ومصادر ثانوية تبعية، كما شمل هذا الباب على أدوات جمع البيانات والأسلوب المتبع فيها والكيفية التي سيكون عليها التحليل ومن ثم هيكل البحث.

أما عن الباب الرابع في تحليل البيانات : عرض فيه الباحث بناء على ما تحصل عليه من بيانات ومن ثم صنفها وحللها تحليلاً مفصلاً، وقام فيه الباحث بعرض المواد القانونية اللازمة من خلال ما جمع من معلومات، ومن ثم قارن تلك البيانات بما جاء عند فقهاء الإسلام للوصول الى نتائج مفيدة والتي كانت في رأي الباحث نتائج جديدة و داعمة الى نظريات سابقة، ومن ثم سرد الباحث تلك النتائج في الباب الخامس والأخير المتعلق بالخاتمة والتوصيات.

الباب الثاني

الإطار النظري

يعد الإطار النظري ذات أهمية كبيرة في بيان معنى النظرية المستخدمة، وهي التي تختلف مع القانون الوضعي والفقهاء الإسلامي، وهذه الدراسة كغيرها من الدراسات التي أهتمت بجانب القانون الجزائي والفقهاء الإسلامي، فقد اتفق الفقهاء الإسلامي فيها على أن الجرائم هي محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير، ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية، ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء الشروط لتوجيه الأحكام الشرعية، وهذا يشمل الجريمة الإيجابية التي تتم بإتيان فعل محظور كما يشمل على الفعل السلبي الذي يتم بالامتناع عن فعل مأمور بإتيانه ذلك أن لفظ المحظورات الشرعية تعني المعنيين³⁵.

حيث أن النظرية لها عدد من المعاني المختلفة باختلاف الفرع التي تستخدم به هذه الكلمة، وبشكل عام، تكون النظرية نوعاً من التفسير لشرح كيفية حدوث ظاهرة معينة، وتكون بشكل خاص عرضة للصواب والخطأ، وهناك فرق شاسع بين الاستعمال العلمي لها والاستعمال العام، حيث بشكل عام يقصد بها الفرضية، وفي هذا المجال لا يتوجب أن تكون النظرية مبنية على حقائق. أما في المجال العلمي تشير النظرية إلى نموذج مقترح لشرح ظاهرة أو ظواهر معينة بإمكانها التنبؤ بأحداث مستقبلية ويمكن نقدها³⁶.

أما عن النظريات الفقهية فهي تتسم بالتجريد والعموم، قوامها أركان وشروط وأحكام جزئية، مستمدة من قواعد الفقهاء وفروعه ومقاصده في كتب المذاهب الفقهية،

35 أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، الأحكام السلطانية (القاهرة : دار الحديث، ط1، بدون تاريخ نشر) 273 . (المتوفي 450هـ،)

Thomas Gary, *Education and theory, strangers in paradigms.* (2007). Press. 11 36

وبذلك تجمعها وحدة موضوعية متجانسة، حيث يعرفها الشيخ مصطفى أحمد الزرقا :
بأنها تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاماً حقوقياً
موضوعياً منبثاً في الفقه الإسلامي، وذلك كفكرة الأهلية وأنواعها وعوارضها، إلى
غير ذلك من النظريات الكبرى التي يقوم على أساسها صرح الفقه بكاملة.³⁷

ويعرفها الدكتور وهبة الزحيلي: بأنها المفهوم العام الذي يؤلف نظاماً حقوقياً
موضوعياً تنطوي تحته جزئيات موزعة في أبواب الفقه المختلفة، كنظرية الحق،
ونظرية الملكية.³⁸

ويعرفها الدكتور جمال الدين عطية بأنها: التصور المجرد الجامع للقواعد العامة
الضابطة للأحكام الفرعية الجزئية.³⁹

حيث تجدر الإشارة إلى أن التفسير النظري والإسلامي لعلاقة الأسرة بالجريمة يكون
في الغالب من أسر تتسم بعدد من الخصائص، مثل كثرة التنقل الاجتماعي، وغياب
أحد الوالدين بسبب الانفصال أو الوفاة أو السجن، وأيضا ممارسة الآباء لبعض
الأفعال الانحرافية والعادات السيئة كالسكر أو الإدمان، أو ضعف في الرقابة الأسرية
وسوء القدوة، الا غير أن تأثير تلك العوامل تباينت من أسرة الى أسرة، وكان أقوى
تأثير لها على ابناء الأسر العريقة من خلال تمثل هذه الثقافة الانحرافية خلال
عمليات التنشئة الاجتماعية التي تمارسها هذه الأسر، وأن الأولاد الذين ينشؤون في
أسر منحرفة يكتسبون الاستعداد للانحراف، من الاقتداء بأبائهم أو ضعف التوجيه
والأشراف، أو نتيجة للعاملين معا.⁴⁰

37 مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، الجزء1 (دمشق : دار القلم، 1418هـ) 235 . (المتوفي 1420هـ)

38 وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء4 (دمشق : دار الفكر، 1984م) 7 . (المتوفي 1436هـ)

39 جمال الدين عطية، التنظير الفقهي، الجزء1 (الدوحة : مكتبة الإسكندرية، ط1، 1407هـ، 1987م) 9 .

40 محمد بن إبراهيم السيف، الظاهرة الإجرامية في ثقافة وبناء المجتمع السعودي، 64 . وما بعدها .

في هذا جاء الإسلام بوجوب النفقة، والأصل في وجوب النفقة على الولد من الكتاب والسنة، يقول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾⁴⁶ . وقال تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾⁴⁷ .

وأما من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ل هند بنت عتبة ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف))⁴⁸ .

فهذه النصوص الشرعية وفق الإسلام تدل على وجوب أن ينفق الرجل على أهل بيته والقيام بمصالحهم، فلا يجوز للوالد التقصير في النفقة على الأولاد ولا تضييعها، بل يلزمه القيام بها على الوجه الأكمل.

أيضاً قد يعاني الأبناء على عكس ذلك شعوراً زائداً بالثقة، فتتجه إرادتهم نحو الجريمة، وهذا يكون نتيجة إفراط بعض الآباء في تدليلهم ورضوخهم لنزواتهم وتلبية كل رغباتهم سواء كانت معقولة أو حمقاء⁴⁹ .

إذا كانت التربية السليمة في الإسلام هي حجر الإنسان في تكوين الشخصية القوية، فإن التربية الخاطئة هي حجر الأساس في تكوين الشخصية الخاطئة⁵⁰ .

3_ استواء الوضع الاقتصادي للأسرة واعتدال حجمها

أما عن الوضع الاقتصادي للأسرة فله بعض الخطر، غير أنه أقل شأنًا من سواه فليس من اللازم أن تتمتع الأسرة بدرجة من الرخاء لكي تكون سوية، وحسبها أن

46 سورة الطلاق - الآية : 16

47 سورة البقرة - الآية : 223

48 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب النفقات، رقم الحديث 5370 (دمشق : دار الريان للتراث، 1407هـ، 1986م) 418 .

49 محمد عبدالله الوريكات، أصول علمي الأجرام والعقاب، 239 . وما بعدها، كما أشار إليها. فتوح عبدا لله الشاذلي، أساسيات علم الأجرام والعقاب (مصر : منشأة المعارف بالإسكندرية) 275-276 .

50 مجلة الأمن والقانون مكتبة اليونيسكو، العدد 2 (ليبيا : طرابلس، 2004م) 37 .

وخاصة عندما تنتضخ المنافع الناجمة عنها، وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى ﴿ كَلَّا
بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ .⁸³

إذا كانت ممارسة الشعائر الدينية لا تصلح في ذاتها مقياساً لمدى التدين، فإن مجرد انتماء الشخص إلى دين لا يصلح مقياساً لذلك من باب أولى، إذ ليس ثمة تلازم بين الانتماء ودرجة التدين، ولذلك فالمقارنة بين أثر العقائد الدينية المختلفة على الإجماع لا يمكن أن تسفر عن نتائج يوثق بها إذا اعتمد الباحث فيها على المقارنة بين إجماع المنتمين إلى تلك العقائد، لأن مجرد الانتماء إلى دين أو مذهب لا يحدد دائماً سلوك المنتمي ولا يحكم بالضرورة كل أفعاله.

حيث إن بعض الدراسات بينت أن مشاكل الشباب خاصة ترجع إلى ضعف الالتزام الديني ومن هنا يمكن القول بأن الدين له أثر كبير في مقاومة الإجماع باعتباره داعياً إلى مغالبة شهوات النفس وكبح جماحها، كل ما هنالك أن هذا الأثر مرهون بمدى تدين الفرد والتدين هنا أمر باطني لا سبيل إلى تلمسه أو قياسه.⁸⁴

5_ الأسرة ونظامها في الإسلام

في هذا المبحث سيتكلم الباحث عن الأسرة والإسلام وحقائقها وتأملاتها من القرآن الكريم، حيث يقول سبحانه وتعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ .⁸⁵

في الآية الكريمة خطاب للناس بصفاتهم، ولردهم جميعاً إلى ربهم الذي خلقهم من نفس واحدة وجعل فيهم أزواج وأبناء، حيث أن هذه الحقائق الفطرية البسيطة هي

83 سورة المطففين - الآية : 14

84 عبد السلام سالم الغرياني، علم الإجماع الاجتماعي (ليبيا : دار الفكر طرابلس، ط1، بدون تاريخ نشر) 194 .

85 سورة النساء - الآية : 1

ب. المبحث الثاني / الطبيعة القانونية والشرعية للجريمة نشأتها ماهيتها أركانها

على الرغم من أن كتابات الفقهاء والباحثين بشأن الطبيعة القانونية للجريمة هي من القلة، وحيث أن التناثر بين المواضيع الجنائية المختلفة فيها غير واضحة، بالتالي فهي لا توضح هذا الموضوع بالدقة المطلوبة لإيضاحه وتبيان تفاصيله المهمة التي تختلف عن مواضيع أخرى، والتي من شأنها أن يختلط معها التكيف القانوني للجريمة، وعلى ذلك لا بد من التعرف على ماهية الطبيعة القانونية من خلال التطرق إلى تعريف الطبيعة القانونية للجريمة ورأي الفقه الإسلامي فيها.

1_ الطبيعة القانونية للجريمة

تعرف الطبيعة القانونية للجريمة بأنها وسيلة لتحديد الواقعة المستوجبة للعقاب وهي الثوب القانوني الملائم لها بلا ضيق ولا اتساع، وينبغي أن يكون الفعل قيد التهمة والذي يتوافق معه هذا الوصف.⁹⁷

يرى الباحث بأنه يمكن القول بأن الطبيعة القانونية للجريمة هي النموذج القانوني الذي يحدده المشرع في قانون العقوبات أو أي قانون عقابي آخر، والذي بموجبه يمكن أن تعد بعض الأفعال جريمة وفقاً لشروط وأركان خاصة مما يترتب على ارتكابها عقوبة معينة.

ترتبط الطبيعة القانونية لها بالتحديد الذي يقوم به المشرع والذي بموجبه تعد بعض الأفعال جرائم يترتب على ارتكابها عقوبات معينة محددة في النص القانوني وفقاً للمبدأ السائد في الدساتير وهو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.⁹⁸

97 محمود عبد ربه محمد القبلاوي، التكيف في المواد الجنائية (مصر: دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 2003م) ص 22.

98 يعد هذا المبدأ مبدأ "دستورياً" وتشريعياً" في آن واحد وذلك لأهميته في الحفاظ على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، لذلك نصت عليه أغلب دساتير الدول العربية وقوانينها العقابية. على سبيل المثال ينظر/ المادة (19 / ثانياً) من دستور العراق الحالي 2005م. المادة (27) من دستور الإمارات العربية المتحدة لعام 1971. المادة (20 / أ) من دستور البحرين 2002م. المادة (66) من دستور مصر

حيث أن مهمة التشريع من جُل اختصاص المشرع فهو الذي ينشئ جرائم ويضع لها عقوبات معينة انسجاماً مع حماية حقوق الأفراد وحررياتهم الشخصية في الدولة من اعتداء الآخرين عليها دون وجه حق، وبالتالي يمتنع على القاضي وفقاً لمبدأ الشرعية الجنائية أن ينشئ جرائم وعقوبات لم ينص عليها المشرع، فدور القاضي ينحصر في تطبيق القانون على الوقائع التي تعرض عليه في إظهار الدعوى المطروحة أمامه، مع إمكانية القاضي ضمن الحدود التي رسمها المشرع له أن يختار العقوبة بين حديها الأدنى والأعلى المحددة من قبل المشرع، أو أن القاضي يمتلك سلطة توقيع العقوبات التخيرية المسموح بها ضمن الإباحة التشريعية للقاضي.

بالتالي يرى فقهاء القانون بأن طبيعة الجريمة القانونية تكمن في النموذج القانوني للجريمة أو إعطاء الواقعة إسم قانوني خاص بها يتكيف معها، ويطلق عليه حينها بالتكييف القانوني، إلا أنه يجب التفرقة بين تلك الطبيعة وهذا التكيف استناداً إلى بعض مواد القانون الجنائي الليبي الذي يرى بوجود فارق أساسي بينهما، فالأول اشمل من الثاني، حيث تندرج مجموعة التكييفات القانونية فيه تحت إسم " الطبيعة القانونية الواحدة للجريمة" وكذلك فإن توافر الأركان الخاصة للجريمة هو الذي يحدد اسمها " وطبيعتها القانونية " في حين أن بعض عناصرها تدخل في كيان الجريمة دون أن تعد من أركانها، وبالتالي يحدد فيها القاضي التكيف القانوني، ويطلق على الأخيرة " الظروف التي تغير من تكييف الجريمة " .⁹⁹

القانون بصورته المجردة لا يمكن أن يحمي حقوق وحرريات الأفراد إلا إذا طبق ضد المعتدين على تلك الحقوق والحرريات، والمطبق للقانون هو القاضي ضمن حدود

1971م . المادة (1) من قانون العقوبات العراقي رقم 111، 1969م . المادة (3) من قانون عقوبات البحرين 1955م . المادة (5) من قانون العقوبات المصري رقم 58، 1937م . المادة (1) من قانون العقوبات الجزائري 1966م .
99 محمود عبد ربه محمد القبلاوي، التكيف في المواد الجنائية، 22 .

الأراضي الليبية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيها، ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره.

ج. الجريمة في الإسلام

الجريمة هي فعل ما نهى الله عنه وعصيان ما أمر الله به، أو بعبارة أعم هي عصيان ما أمر الله به بحكم الشرع الشريف، وهذا التعريف عام بحيث يشمل الجريمة المعاقب عليها دنيوياً من قبل الحاكم، كما يشتمل على الأفعال المعاقب عليه بالعقوبات التكليفية الدينية التي تكون كفاره للإثم، بجانب العقوبات الربانية المؤجلة ليوم الحساب عند رب العالمين.¹⁰⁶

غير أن الإسلام يحارب الجرائم لأنه يرى بأن الإنسان يجب عليه أن يعيش في طريق شريف، وأن يحيا على ثمرات كفاحه وجهده الخاص، أي أنه لا يبنى كيانه على الجريمة، رغم أن الإسلام لا يعتبر أي فعل من الأفعال جريمة إلا ما فيه ضرر محقق للفرد والجماعة، ويظهر هذا الضرر فيما يمس الدين أو العرض أو النفس أو النسل أو المال، وما يترتب على ذلك من فساد وإخلال في المجتمع.¹⁰⁷

بالتالي فإن الإسلام هنا يستهدف حماية أعراض الناس من كل ما يمس كيانهم، وحياتهم، وبذلك فإن المحافظة على سمعتهم وصيانة كرامتهم من الواجبات التي يسعى هذا الدين الحنيف لتحقيقها، حيث يظل الإسلام دائماً أبداً وفيّاً لمبدئه القاضي بتنظيف البيئة ووقايتها من الفتنة والجريمة، وابتغاء صياغة مجتمع بلا مشاكل، وفي سبيل ذلك تتبّع الإسلام أسباب الفتنة فحذر منها.

106 عبدالفتاح خضر، الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقهاء الإسلامي (السعودية : معهد الإدارة العامة بالرياض، 1985م) 12 .

107 عبد الله ناصح علوان، تربية الأولاد في الإسلام (مصر: دار السلام، ط5، 1406هـ، 1985م) 65 .

سلبية، ومن أمثلة ذلك كثرة الضرب، وحمل السلاح، وفك الأختام، والتدخل في الوظائف العامة.¹¹⁸

(ب) **النتيجة الضارة** : ويقصد بالنتيجة الضارة للجريمة هو التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الاجرامي، أو المصلحة التي يحميها المشرع¹¹⁹ مما يعني أن للنتيجة الضارة مدلولين احدهما مادي، وهو التغيير الناتج عن السلوك الاجرامي في العالم الخارجي، والآخر قانوني وهو العدوان الذي ينال مصلحة او حقاً يحميه القانون.¹²⁰

(ج) **العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة** : قد يقع السلوك الاجرامي بالعلاقة السببية، وتتحقق فيه النتيجة الضارة، ورغم ذلك ليس هناك مسؤولية جزائية فيه والسبب يعود الى عدم وجود تلك العلاقة، ولكي تتحقق المسؤولية الجزائية فيه لا بد أن ترتبط النتيجة الضارة هنا مع الفعل او السلوك الاجرامي ارتباط السبب بالمسبب، بغض النظر عما إذا كان الجاني قد توقعها ام لا، الامر الذي يترتب عليه أن السببية عنصر في الركن المادي للجريمة عمدية كانت أو غير عمدية، فهي تكون الصلة بين الظاهرتين الماديتين، ومن ثم فهي ذات طبيعة مادية وليست على صلة بالركن المعنوي ولا شأن لها به.¹²¹

حيث ظهرت في هذا الصدد نظريتان :

118 سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات (الكويت : مطابع الرسالة الكويت، 1982م) 139. وما بعدها وعرف السلوك الاجرامي أيضاً بأنه (الفعل) الذي يراد به النشاط المادي الخارجي المكون للجريمة وبالتالي فلا جريمة من دونه لأن القانون لا يعاقب على مجرد النوايا والرغبات والشهوات.

119 فخري عبد الرزاق الحديثي، قانون العقوبات القسم الخاص، (بغداد : مطبعة الزمان، 1992م) 188-18.

120 سلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، 140 .

121 نفس المرجع، 192 .

الأولى / نظرية تعادل الأسباب : وتقوم هذه النظرية على أن سلوك الجاني هو السبب في حدوث النتيجة، بغض النظر عن حجم هذا السلوك، ومدى إسهامه في إحداث النتيجة.

نقد النظرية : لم تسلم هذه النظرية من النقد لأنها تؤدي إلى نتائج غير منطقية، مثال ذلك : لو تماثل مريض إلى الشفاء، وقبل خروجه من المشفى نصحه الطبيب بالمشي يوماً فترّة من الزمن، وبعد خروجه وهو ينفذ النصيحة أوصاه أخوه بسلوك طريق معين، وفي هذا الطريق استوقفه صديقه قليلاً ليسأله عن حاله، فلو صدمته سيارة إثر ذلك فقتلته لسئل أولئك جميعاً عن موته، إذ لولا نصيحة الطبيب ولولا وصية الأخ ولولا استيقاف الصديق لما صدمته السيارة ولما مات وفقاً لهذه النظرية، وهذا الفهم ينافي المنطق والصواب، وبالتالي هُجرت هذه النظرية ولم يُكتب لها البقاء.

الثانية / نظرية السبب الملائم : تختلف هذه النظرية عن الأولى في أنها لا تستوي بين جميع العوامل التي تساهم في إحداث النتيجة، بل إنها تعتد بالسبب الذي من شأنه إحداث النتيجة، فمجرد خدش في الكنف لا يؤدي إلى الوفاة، بل لابد من طعنة أو إطلاق ناري صوب القلب.

نقد هذه النظرية : إن هذه النظرية قدمت طرحاً مقبولاً إلى حدٍ ما، حيث أخذت بها معظم التشريعات الجنائية في العالم الخارجي، إلا إنها تعرضت أيضاً للنقد الذي من شأنه أن يضيق المقام عن طرحه، فنكتفي بالأخذ بالنظرية الأولى.

(2) _ الجريمة بحسب ركنها المعنوي

لا يكفي لقيام الجريمة قانوناً ومسائلة فاعلها جنائياً مجرد ارتكاب ماديات الجريمة المتمثلة في عناصر الركن المادي، بل ينبغي أن يتوافر لدى الجاني قدر من الخطأ

أو الإثم وهو ما اصطلح تسميته على الركن المعنوي، فلا جريمة إذن دون خطأ
مهما كانت النتائج التي تمخضت عنها.¹²²

قد تعددت المسميات الفقهية للتعبير عن الركن المعنوي، حتى أن البعض وصفه
بأنه الركن الأدبي للجريمة، أو ركن الخطأ أو الإثم أو الذنب أو الخطيئة، ولا يؤثر
هذا على حقيقة الركن المعنوي، ولا ينتقض من محتوى عناصره.¹²³

من هنا يتضح في خلاصة القول أن للركن المادي أربع عناصر متمثلة في إرادة
النشاط المكون للركن المادي للجريمة والعلم بكافة عناصره الواقعية الآزمة قانوناً
بقيام تلك الجريمة والعلم بصلاحيته الناشط لإحداث الجريمة وتوافر موقف نفسي
للفاعل إزاء النتيجة.¹²⁴

3- الجريمة بحسب ركنها الشرعي

لم يأخذ بها فقهاء القانون ويقصد بها نص التجريم الذي يضيف على الفعل أو
الامتناع بصفته الغير مشروع، فالجريمة لم تكسب وصفها كجريمه إلا مند تقرر
تجريمها بنص قانوني، وما عدم ذلك لا يعد من الجرائم، حيث بدون نص تجريمي
يصبح الفعل أو لامتناع عنه مشروعاً مهما بدا ملوماً أو مأثماً من وجهة نظر الدين
أو الأخلاق، أو الأعراف الاجتماعية، ومن هنا ترتبط شروط الركن المادي للجريمة
بالركن الشرعي من حيث العلم والكفاية.¹²⁵

122 حسن المرصفاوي، قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية (مصر : معهد البحوث والدراسات العربية، 1972م) 64 .
123 راجع تفصيلاً عن الركن المادي، أحمد بلال، الإثم الجنائي دراسة مقارنة (مصر : دار النهضة العربية، 1989م) وينظر فتوح
الشاذلي، قانون العقوبات القسم العالم (القاهرة : دار المطبوعات الجامعية، 1998م) 437 وما بعدها . وعلى سبيل المثال ، المادة
230 من قانون العقوبات الليبي تعاقب كل (من قتل نفساً عمدًا ..) والمادة 236 تنص على (كل من جرح او ضرب عمداً ..) والمادة
252 (كل من وضع عمداً ناراً ..) وغيرها من المواد كثيرة في هذا القانون
124 عمر سعيد رمضان، بين النظريتين النفسية والمعياري والإثم، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 1 (القاهرة : 1964م) 615 .
125 السيد مصطفى السيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات (القاهرة : مطبعة مصر، ط3، بدون تاريخ نشر) 87.

أن من الأفعال ما قد تتداول فيها الأحكام الشرعية الخمسة تبعاً لظروف الحال على نحو ما هو معروف عند الفقهاء.

لعل منطقة المباح هي أخصب المناطق وأكثرها دلالة على حيوية الشريعة الإسلامية وقدرتها على التكيف مع الواقع المتغير، وعلى الوفاء بحاجة المجتمعات الإسلامية كلها مهما اختلف مكانها وزمانها، فالمباح في الشريعة كما يعرفه الشاطبي هو ما خير فيه بين الفعل والترك بحيث لا يقصد فيه من جهة الشرع إقدام ولا إحجام، لأنه لا أثر له على مصالح المجموع سلباً ولا إيجاباً، وهذا يعني أنه لكي يظل المباح على حكمه " من الإباحة " يجب أن يكون فعله وتركه متعلقاً بالمصلحة العامة، أما إذا ثبت في ظروف معينة أن فعله أو تركه يلحق بهذه المصلحة ضرراً أو يحقق لها نفعاً، فعلى الإمام أن ينهي عنه أو يأمر به وعندئذ لا يعود المباح مباحاً، بل ينقلب محظوراً أو واجباً، ويصح به تعزيز المخالف شرعاً.¹³¹

حيث أن في الفقه الإسلامي خلاف في مدى حق الإمام في الأمر بالمباح وفي النهي عنه، وقد أورد الشيخ المراغي، في دراسة قيمة له، أقوال الفقهاء في هذا الموضوع واختار أرجحها، ورد شبهة والتي من شأنها قد يعترض بها على الرأي الذي الراجح، ولا بأس من أن ننقل هنا عبارته لتأكيد ما صوبناه، قال رحمه الله : إن الطاعة لهم " يعني لأولي الأمر " ما داموا على الحق، فلا تجب طاعتهم فيما خالف الشرع، إنما الطاعة في المعروف فقط، وقيل أنه لا تجب طاعتهم فيه، لأنه لا يجوز

131 إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، كتاب الموافقات، المحقق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الجزء 1 (الرياض : دار ابن عفان، ط1، 1417هـ، 1997م) 104-105. ويقول أيضاً: "إن الكلام في أصل المسألة إنما هو في المباح من حيث هو متساوي الطرفين ولم يتكلم فيما إذا كان ذريعة إلى أمر آخر، فإنه إذا كان ذريعة إلى ممنوع صار ممنوعاً من باب سد الذرائع لا من جهة كونه مباحاً". 79-80. ويقول أيضاً: "قد يتعلق بالمباح في سوابقه أو لواحقه أو قرائنه ما يصير به غير مباح" 80. ويؤصل المسألة بقوله: "إن المباح عند الشارع هو المتساوي الطرفين، فكل ما ترجح أحد طرفيه فهو خارج عن كونه مباحاً، إما لأنه ليس بمباح حقيقة وإن أطلق عليه لفظ المباح، وإما لأنه مباح في أصله ثم صار غير مباح لأمر خارج" 90.

ج. المبحث الثالث / العقوبة الشرعية عند الفقهاء والأسس التي تحكمها

1_ العقوبة الشرعية في الاصطلاح الفقهي

تكلم فقهاء الإسلام كثيراً عن العقوبة في مواضيع عديدة، منها ما جاء في فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية حيث رأى : أن العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده فهي صادرة عن رحمة الخالق بهدف الإحسان لهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان اليهم، والرحمة بهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض .¹³⁷

أ_ عرفها الحنفية فقالوا: العقوبة تكون على فعل محرم، أو ترك واجب، أو سنة أو فعل مكروه.

ب_ عرفها المالكية فقالوا: العقوبة هي زواجر، إما على حدود مقدرة، وإما تعزيرات غير مقدرة.

ج_ عرفها الشافعية فقالوا: العقوبة جزاء على الإصرار على ذنب حاضر، أو مفسده يتوجب فيها ملابسة إثم على فاعلها، أو جزاء على ذنب ماض منصرم، أو عن مفسده منصرمة.

د_ عرفها الحنابلة فقالوا: العقوبة تكون على فعل محرم أو ترك .¹³⁸

هذه جملة من تعريفات العقوبة في المذاهب الأربعة، والمتأمل فيها يرى توسعاً، ويرى الباحث أنها جميعها قد تضمنت ما لا يستحق فاعلها أو تاركها العقاب، مثل

137 تقي الدين ابن تيمية، مجموع فتاوي، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد النجدي الحنبلي (دمشق : مطابع المختار الاسلامية ط2، 1399هـ) 329 . (المتوفى 728هـ)

138 مجلة البحوث الإسلامية، أثر التوبة على عقوبة القذف في الفقه الإسلامي، الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، الفصل الرابع في تعريف العقوبة الجزء 66 (السعودية : 1423هـ) 266 .

أ_ مذهب جمهور الفقهاء

عدم جواز عقوبة الغرامة : قال ابن عابدين تعليقاً العقوبة تكون " لا بأخذ مال " غير أن بعضهم يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال، وظاهره ذلك أن بعضهم يفيد بأن معنى التعزير هو أخذ المال على القول به، أو إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر بها ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة، إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي .¹⁴⁷

وقال الشيخ أحمد الصاوي المالكي : وأما التعزير بأخذ المال فلا يجوز إجماعاً .¹⁴⁸

وقال الإمام العمراني الشافعي في معرض ذكره لأنواع المزكين إن أخفوا أموالهم حبسهم الإمام، فإذا ظهرت ففي القدر الذي يؤخذ منهم قولان :

أحدهما: قال في القديم يأخذ منهم الزكاة، وشطر مالهم عقوبة لهم، لما روى عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((في كل أربعين من الإبل السائمة ابنة لبون فمن أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن كتمها فإننا لآخذوها وشطر ماله عزيمة، من عزائم ربك لا تحل لمحمد ولا لآل محمد)) .¹⁴⁹

147 ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المختار على الدر المختار، الجزء 4 (لبنان : بيروت دار الفكر، ط2، 1412هـ، 1992م) 61 . (المتوفى 1252هـ)

148 محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، الفقه المالكي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الجزء 6 (دار إحياء الكتب العربية، بدون تاريخ نشر) 370 . توفي الشيخ أحمد الصاوي المالكي بعد سنة (1329هـ)

149 جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، شرح السيوطي سنن النسائي، كتاب الزكاة، رقم الحديث 2444 (دمشق : دار البشائر الإسلامية، 1406هـ، 1986م) 17 . (المتوفى 858هـ) ونقل عن الشافعي أن هذا الحديث لا يثبتته أهل العلم. ينظر أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، البيان في مذهب الإمام الشافعي، المحقق: قاسم محمد النوري، الجزء 3 (جدة : دار المناهج، ط1، 1421هـ، 2000م) 137 .

ب)ـ أن تأديب الجاني لا يعني الانتقام منه أو التشفّي فيه عند تنفيذ العقوبة عليه، وإنما استصلاحه وتحسين خلقه، والعقوبات على اختلاف أنواعها تتفق كما يقول الفقهاء في أنها تأديب واستصلاح وزجر تختلف حسب اختلاف الذنب.¹⁵⁸

يرى الباحث أن العقوبات إنما شرعت رحمة من الله بعباده، فهي صادرة عن رحمة الخالق بهدف الإحسان لهم، وفكرة الانتقام أو التشفّي من الجاني لا وجود لها ولا أساس ولا تقر بها بأي حال من الأحوال في الشريعة الإسلامية.

ج)ـ اقتران العقوبة عند التنفيذ بتطهير الجاني من إثم جريمته في نظر الناس وعند الله، وبذلك يبعد الجاني عن التحايل والتهرب، حتى وإن كانت العقوبة مقررة أصلاً لحماية حق فردي خاص، كما هو الحال في القتل العمد الموجب للقصاص لأنه ما من حق إلا وفيه شيء ينظمه.

د)ـ تحقيق العدالة بالنسبة للجاني والمجني عليه معاً، بحيث يأخذ الجاني حقه في العقاب المناسب، والمجني عليه تسترد له كرامته.

هـ)ـ تدرج العقوبة بتدرج نوعية الجرائم، وهذا خاص بالعقوبات التعزيرية والسلطة فيها واسعة التقديرية للقاضي، وتبدأ من اللوم إلى الإعدام، بل أن العفو من العقوبة عن بعض الجناة يعد من أنواع العقوبة.¹⁵⁹

أ_ شروط العقوبة الشرعية

يشترط في كل عقوبة أن تتوفر فيها شروط معينة لتكون العقوبة شرعية متساوية بين الناس وهذه الشروط يطلق عليها علماء الشريعة " شروط العقوبة " بينما يطلق

158 ابراهيم رمضان عطايا، فردية العقوبة وأثرها في الفقه الإسلامي (القاهرة : دار الفكر الجامعي، ط1، 2007م) 16 . نقلا عن فتح القدير للكمال من الهمام الحنفي (بيروت : دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ نشر) 3-5 وما بعدها.
159 واصل نصر فريد محمد، الفقه الجنائي، 47 وما بعدها.

عليها القانونيون " خصائص العقوبة " والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، ويمكن القول بأن الشرط في العقوبة هو ما يلزم من عدمه عدم العقوبة ولا يلزم من وجوده وجود العقوبة ولا عدمها.¹⁶⁰ وحيث إن الخصائص في قانون العقوبات تعني مجموعة مبادئ والتي تراعيها الشرائع العقابية في وضع شبكة العقاب.¹⁶¹

أخلص من ذلك أن الخصائص في قانون العقاب أشياء ملازمة للعقوبة حيث لا توجد عقوبة بدون تلك الخصائص، وعليه فإنها بمثابة الشروط لتلك العقوبة، ومما بدى لي أنهما بمعنى واحد خصوصاً في مجال العقوبات غير أن الفقهاء اصطاحوا على أنها شروط، وفي الجهة المقابلة اصطاح القانونيين على أنها خصائص ولا مشاحة في الاصطلاح، وهذه الشروط يمكن بيانها على التالي :

(أ) - أن تكون العقوبة شرعية تخص الدين وحده : وتعتبر العقوبة شرعية إذا كانت تستند إلى مصدر من مصادر الشريعة، كأن يكون مردها القرآن أو السنة أو الأجماع، أو صدر بها قانون من الهيئة المختصة، ويشترط في العقوبات التي يقررها أولو الأمر ألا تكون منافية لنصوص الشريعة، وإلا كانت باطلة.

يترتب على اشتراط شرعية العقوبة : أنه لا يجوز للقاضي أن يوقع عقوبة من عنده ولو اعتقد أنها أفضل من العقوبات المنصوص عليها.¹⁶²

وهذا الشرط فيه ضمان للأفراد غير أنه لو طبق حرفياً لوقف حائلاً دون ما قد تنتفع له رحمة القاضي تقديراً لظروف كل منهم ولذلك فإن الشرع عندما ينص على العقوبة

160 محمد بن محمد الخطيب الشربيني شمس الدين، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (بيروت : دار الفكر، 1415هـ) 1-120 .

161 ابراهيم رمضان عطايه، فردية العقوبة وأثرها في الفقه الاسلامي، 18. نقلا عن عبدالفتاح الصيفي، علم الاجرام والعقاب، محمد زكي أبو عامر، 394 .

162 عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، الجزء 1 (بيروت : دار الكاتب العربي، بدون تاريخ نشر) 629 .

فإنه يراعى في كيفية تحديدها، على أن يترك الفرصة للقاضي ليفحص حالة كل جان ومدى استحقاقه للرفقة والشدة.

(ب) - أن تكون العقوبة تعبيراً عن مقابل جريمة معينة، ومسؤولية مجرم عن هذه الجريمة، أي أنها جزاء يقابل في آن واحد، كما يقتضي أن تقاس العقوبة من حيث شدتها بما يتناسب مع مقدار جسامة الجريمة ودرجة مسؤولية المجرم.

(ج) - أن تكون العقوبة شخصية : بمعنى أن تصيب الجاني ولا تتعداه إلى غيره، وهذا الشرط هو أحد الأصول التي تقوم عليها الشريعة الاسلامية، لأن من القواعد الأولية في الشريعة الاسلامية أن المسؤولية الجنائية شخصيه فلا يسأل عنها إلا فاعلها ولا يؤخذ شخص بجريرة غيره مهما كانت درجة القرابة أو الصداقة بينهما .¹⁶³ وفي القرآن الكريم شواهد كثيرة على ذلك منها قول الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ ﴾ .¹⁶⁴

وقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ .¹⁶⁵ وقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ .¹⁶⁶

وجاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا المبدأ حيث يقول صلى الله عليه وسلم ((لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه)) .¹⁶⁷

وشرط شخصية العقوبة هذا يطبق تطبيقاً دقيقاً في الشريعة الإسلامية من يوم وجودها على الرغم من أن العقوبة شخصية فإن آثارها قد تلحق في كثير من

163 عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، 630 .

164 سورة الانعام - الآية : 164

165 سورة فصلت - الآية : 46

166 سورة النساء - الآية : 123

167 السنن الكبرى، كتاب المحاربة، باب قتال المسلم، الجزء 2 (بيروت : دار الكتب العلمية، بدون تاريخ نشر) 318 . رقم الحديث

3592 . وسنن النسائي، كتاب تحريم الدم، الجزء 2 (حلب : مكتبة المطبوعات الاسلامية) 127 . رقم الحديث 4127 .

أ_ جنایات في حق الله وهي " كالسرقة " ولا يهمننا دراستها في هذا الصدد

ب_ وجنایات في حق الله والعبد معاً "مثل زنا الزوج والزوجة المحصن وعدم التوبة "

هذا مانحن فيه الآن بمعنى أنه أقرب للشيء الذي نحن فيه من دراسة، وبالتالي من أهم صفات الحدود في جريمة الزنا أن العقاب فيها لا يشبه نوع الجريمة المرتكبة، فجلد الزاني حد ولكن الجلد لا يشابه الزنا في شيء .فإذا كان الزاني غير محصن فحده الجلد إن كان حراً؛ لقول الله تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .¹⁷³

أما إذا كان الزاني محصناً أي متزوجاً، شدة العقوبة عليه، حيث أوجبت عليه عقوبة الرجم حتى الموت رجلاً كان أو امرأة، وهذا محل إجماع بين العلماء، ودليل ذلك حديث ابن عباس في صحيح البخاري في قصة رجم الصحابي الذي زنى واسمه ماعز، حيث جاء في الحديث حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ((أتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه و سلم فقال أبك جنون، قال لا : قال فهل أحصنت قال نعم فقال النبي صلى الله عليه و سلم اذهبوا به فارجموه)) .¹⁷⁴

173 سورة النور - الآية : 2

174 محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صحيح البخاري الجامع الصحيح المختصر، تحقيق، مصطفى ديب البغا، الجزء 6 (بيروت : دار ابن كثير، اليمامة، ط3، 1407هـ، 1987م) 2499 . رقم الحديث 6430 .

ب. الظروف المشددة والمخففة للعقوبات في القانون الليبي

أ) _ الظروف المشددة للعقوبات في القانون الليبي

يقصد بتشديد العقوبة أن يحكم القاضي بعقوبة تزيد في مقدارها عن الحد الأقصى المنصوص عليه قانوناً، أو تعلق في نوعها على العقوبة المنصوص عليها، إما لظروف مادية موضوعية تقترب بالفعل الإجرامي ذاته، وإما لظروف شخصية ذاتية تتعلق بالجاني، ومعنى ذلك إنه لا يعتبر من قبيل تشديد العقوبة أن يصل القاضي في حكمه بها إلى الحد الأقصى المنصوص عليه فيها، فمثل هذا الحكم يدخل في السلطة التقديرية المخولة له.

أما تشديد العقوبة في معناه القانوني فهو يعني تجاوز الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها قانوناً، ولهذا فلا يكون التشديد إلا بنص قانوني خاص، ولهذا تعتبر العقوبة المشددة رادعاً قوياً يحول دون العودة لذلك الفعل مجدداً.

أ_ أسباب تشديد العقوبة نوعان

1_ أسباب موضوعية أو مادية وهي الظروف التي تقترب بالركن المادي للجريمة كظرف الليل والكسر والتسلق والإكراه في جريمة السرقة.

2_ أسباب تشديد شخصية وهي التي ترتبط بشخص الجاني المرتكب للجريمة في حق إنسان آخر، ومن امتثلتها العودة إلى الجريمة أو الباعث لها على ارتكابها أو الدافع الدائي لها، كصفة الجاني في جريمة السرقة أو صفة الطبيب في جريمة الإجهاض، وقد تكون خاصة ببعض الجرائم، وقد تكون عامة تسري على كافة الجرائم، وقد يجتمع الأمرين فيها معاً، فيرجح الأمر الأيسر فيها بمعايير يراعى فيها حالة الجاني وقت ارتكاب الجريمة.

التي أشارت إليها "المادة 28 عقوبات" وما في حكمها على ألا يجوز للقاضي أن يتعدى الحدود التي ينص عليها القانون ما لم تكن هناك أسباب للتخفيف أو للتشديد وفي حالة توافر أحد هذه الأسباب فعلى القاضي هنا ألا يتجاوز ما يسمح به القانون في هذا الشأن.¹⁹⁷

قد نصت على هذا التحديد نطاق السلطة التقديرية للقاضي في المادة " 27 عقوبات بقولها " يحكم القاضي بالعقوبة التي يراها مناسبة في حدود ما نص عليه القانون وعليه أن يبين الأسباب التي تبرر تقديره لها ولا يجوز له تعدي الحدود التي ينص عليها القانون لكل عقوبة بزيادتها أو انقاصها الا في الأحوال التي يقرها القانون " وبالتالي يكون المعيار لتقدير العقوبة هو طبيعة الفعل والقصد الجنائي منه، وسلوك مرتكب الفعل في ذلك الوقت وظروف حياته الشخصية والعائلية والاجتماعية.¹⁹⁸

كما أستقر قضاء المحكمة العليا الليبية على أنه اذا كان الحكم قد دان الجاني بالحد الأدنى للعقوبة الواجبة التطبيق، فإن عدم تبريرها لا يعد مخالفة للقانون ولا يجوز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم بالنقض لإنعدام مصلحته.¹⁹⁹

197 محمد رمضان باره، قانون العقوبات الليبي، القسم العام، 63 وما بعدها.

198 نفس المرجع، 66 .

199 المحكمة العليا الليبية، الجلسة 1963/4/4 م . مجموعة المبادئ القانونية، الجزء 1، 236 . وأيضاً جلسة 1965/5/12م ، الجزء 3،

193 . نقلا عن محمد رمضان باره، قانون العقوبات الليبي، 65 .

أ)- آراء العلماء والمفكرين في المنهج الوصفي

يؤرخ الكثير من العلماء للمنهج الوصفي في الدرس اللغوي بما قدمه العالم " دي سوسير " من آراء بني عليها ما يعرف بالمنهج الوصفي، أو علم اللغة الوصفي .²⁰¹

ويعود سبب تأريخ العلماء لهذا المنهج حينما اتجه البحث في أوروبا طيلة القرن التاسع عشر إلى الدراسة المقارنة والتاريخية، التي ترى بأن فهم اللغة اللاتينية لا تتم إلا من خلال مقارنتها بغيرها، وهو يوضح أنّ الطريقة المثلى لدراسة اللغة على مستوياتها المتعددة لا تتم إلا من خلال هذه المستويات والنظم اللغوية، لا من غيرها.

1_ يعتبره البعض بأنه سيد المناهج مثل " الدكتور عصام فاروق " لأنه يعتمد في ذلك على الوصف لا على الانطباعات الشخصية، التي تختلف اختلافاً كبيراً بين شخص وآخر، وإنما على الوصف العلمي الذي يستند على التحليل، حيث يراه بأنه لا يكون وصفاً علمياً إلا إذا سبقه تحليل .²⁰²

2_ يعتبره البعض الآخر مثل الدكتور " ريحي مصطفى عليان " والدكتور " عثمان محمد غنيم " بأن المنهج الوصفي يختص بأسلوب دراسة الحالة ويهتم بالدراسة المتعمقة لحالة من الحالات من كافة الجوانب التي قد تؤثر بها. فلكي يقوم أحد الأشخاص بوصف واقع الظاهرة كما هي، فمن المحتمل أن يحتاج الى دراسة أجزائها أولاً أو مكوناتها، ومن ثم وصفها وصفاً كمياً أو كيفياً، كمن يقوم بدراسة مؤسسه أو وحدة أو جمعية أو هيئة أو فرد أو جماعة ومن ثم تحديد وتحليل العوامل

201 فرديناند دي سوسير (بالفرنسية: *Ferdinand de Saussure*) عالم لغوي سويسري شهير، (المتوفي 1913م) من أشهر علماء اللغة في العصر الحديث حيث اتجه بتفكيره نحو دراسة اللغات دراسة وصفية باعتبارها ظاهرة اجتماعية وكانت اللغات تدرس دراسة تاريخية، وكان السبب في هذا التحول الخطير في دراسة اللغة هو اكتشاف اللغة السنسكريتية، ويعتبر هذا العالم بمثابة الأب للمدرسة البنوية في علم اللسانيات، فيما عدّه كثير من الباحثين مؤسس علم اللغة الحديث، كانت جميع كتبه باللغة الفرنسية ونشرت سنة 1916م، بعد وفاته وقد نقلت إلى العربية بترجمات متعددة ومتباينة . ينظر الى هذا الرابط تاريخ الاطلاع 2018/4/29م <https://archive.org/details/delemploidugni00sausuoft/bm12:35> (2018 م)

202 عصام فاروق المنهج، الوصفي أسسه ووجوده في التراث العربي، الجزء 1 (القاهرة : بدون تاريخ نشر) 3 .

التي أثرت أو تؤثر فيها والظروف المحيطة بها .²⁰³

3_ يعتبره البعض الآخر مثل " الدكتور أحمد إبراهيم خضر " بأنه مظلة واسعة ومرنة تتضمن عددا من المناهج والاساليب الفرعية المساعدة والداخلية تحت مظلة المنهج الوصفي مثل المسوح الاجتماعية أو الدراسات الميدانية أو دراسة الحالة وغيرها، ولهذا يكاد المنهج الوصفي يشمل كافة المناهج الاخرى باستثناء المنهجين التاريخي والتجريبي، ذلك لأن عملية الوصف والتحليل للظواهر تكاد تكون مسألة مشتركة وموجودة في كافة انواع البحوث العلمية .²⁰⁴

4_ يعتبره البعض الآخر كالمفكر " ماثيو جيدير " بأن هذا المنهج مبني على دراسة الحالة، ولا يقتصر على التعرف على معالم الظاهرة وتحديد أسباب وجودها، وإنما يشمل على تحليل البيانات ودراستها ومن ثم تحليلها وتفصيلها وتفسيرها، ومن ثم التوصل الى الوصف الدقيق لها، ويشمل بذلك كل المناهج سواء كانت الفرعية منها أو الأساسية .²⁰⁵

5_ يعتبره البعض الآخر كالدكتور " إسماعيل سعيد صيني " بأن هذا المنهج لا يشترط فيه التحليل، بل يتطلب التركيز فيه على بعض الجزئيات الموصوفة فقط، حيث من خلال التركيز على تلك الجزئيات وحصرها، سيتم التعرف على الأجوبة المناسبة لمشكلة البحث .²⁰⁶

203 ربحي مصطفى عليان، وعثمان محمد غنيم، *مناهج وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيق* (عمان : دار صفاء للطباعة ، ط1، 2008م) 52-59 .

204 أحمد إبراهيم خضر، *الملاحم العامة للمنهج الوصفي*، الجزء1 (مصر : مطبعة الإسكندرية، 1434هـ) 4 . هو أحمد إبراهيم عبدالرحمن خضر من مواليد بمحافظة أسوان بمصر، التحق بقسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، 1966م، حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع العسكري، وحصل على الدكتوراه في نفس التخصص، 1979م .

205 ماثيو جيدير، *منهجية البحث*، تنسيق محمد السيد غانم، (باريس : بدون تاريخ نشر) مترجم من الفرنسية للعربية، 100 .

206 سعيد إسماعيل صيني، *قواعد أساسية في البحث العلمي* (السعودية : شبكة الألوكة، ط2، 2010م) 97 .

مجموعة من الخطوات من أجل الوصول إلى الحقيقة العلمية المتعلقة بالظاهرة المدروسة، وحيث أن العلوم القانونية تستعين بالمنهج المقارن في الكثير من الدراسات، وذلك من خلال مقارنة مؤسسات قانونية بمؤسسات قانونية بنظم قانونية أخرى .²¹⁴

بالتالي فإن استخدام تلك المناهج يكون فيها مناقشة منطقية ربطاً بين المعلومات المرتبطة بمحور الدراسة وبين الموضوع الذي اختاره الباحث، وعليه فإن الباحث سيقوم بتدوين وتنظيم البيانات التي تحصل عليها من المصادر الأولية والثانوية بشكل مرتب، وسيقوم بتصنيفها من مواضيع كليه إلى مواضيع جزئية متبعاً التسلسل الزمني للجرائم المذكورة، والعقوبات التي نص عليها القانون، ولقد ركز الباحث على الاساس القانوني والشرعي للجرائم والعقوبات المتعلقة بالأسر، وعلى ذلك سيقوم الباحث بتحديد خطوة أخرى، وهي خطوة التحقق من النتائج التي توصل إليها الباحث ومناقشتها وتحليلها وترتيبها في إطار متسلسل حتى يصل إلى تدوينها بشكل منظم، ويمكن تلخيص ما سبق في النقاط التالية :

1_ تنظيم وإسراد البيانات.

2_ تصنيف وعرض البيانات.

3_ تحليل ومناقشة البيانات.

4_ المقارنة والتحقق من النتائج.

5_ صياغة النتائج بشكل منظم.

هـ. تتبع الباحث المنهج الآتي في الكتابة

1_ جميع للآيات القرآنية أنسبت إلى السور القرآنية بين قوسين مزهرين وذكر الباحث كل أرقام آياتها في الهوامش.

214 نائل العواملة، أساليب البحث العلمي، 79 . وينظر ابراهيم حسن على، المصادر وطرق البحث (القاهرة : مكتبة النهضة الإسلامية، ط2، 1963م) 54 .

- 2_ نقل الباحث النصوص والمعلومات من مصادرها الأصلية والتبعية المنقولة عنها محيلاً إلى المصدر في الهامش إذا كان نصاً أو نقلاً.
- 3_ خرج الباحث الأحاديث الشريفة من المكتبة الشاملة من كتب الحديث بذكر المؤلف، ورقم الحديث، والجزء والصفحة توفيراً على القارئ وقته وجهده.
- 4_ قام الباحث بتعريف المصطلحات وشرح الكلمات الغريبة الواردة في البحث.
- 5_ ذكر الباحث في هذا البحث اسم المرجع كاملاً بدايةً بمؤلفة ومن ثم اسم الكتاب بخط مائل والجزء إن وجد ومن ثم قوسين كتب بداخلهما أسم الدولة ودار النشر ورقم الطبعة وسنة النشر ورقم الصفحة، وإن تكرر اسمه مرة أخرى اكتفى الباحث بالإشارة إلى اسم الشهرة والمؤلف واسم الكتاب مختصر الجزء والصفحة دون الحاجة إلى تكرار المعلومات مرة أخرى إلا إذا أخذت من طبعة مختلفة وأكتفى الباحث بكتابة مرجع سابق أو سبق ذكره.
- 6_ تم وضع علامات الترقيم والتشكيل كما يقتضي البحث العلمي.
- 7_ تم إتباع خطوات كتابة البحث العلمي كما يستوجبه الكتاب الرسمي المقرر من جامعة سونان أمبيل الحكومية بدولة أندونيسيا.

السليم ركن عرفي، يحدده الزمان والمكان والثقافة، وحيث تتمثل أركان هذه الجريمة وفق القانون الليبي كما في الآتي :

1)_ الركن المادي :

إن الأصل أن يكون الوالد أو الولي أو الوصي على هذا الولد موكلاً بالاعتناء به وتوفير الحماية والرعاية له، وكافة مستلزماته من طعام ولباس وفرش ومسكن وغيرها، من مستلزمات ومتطلبات الحياة التي لا يستطيع العيش بدونها، حيث إن هذا واجب حتمته عليه الشريعة الإسلامية والقوانين كافة، وتقع هذه الجريمة بالسلوك الايجابي والسلوك السلبي، كالإهمال وعدم توفير الاحتياجات الأساسية لهذا الواجب المفروض على الوالد أو الولي أو الوصي بتوفير كافة مستلزمات هذا الولد وإعالتة كما كلف به الشرع الحكيم، فتقع هذه الجريمة بأن يرفض الوالد أو الولي أو الوصي تقديم هذه المستلزمات، كأن يرفض أن يقدم له الرعاية والعناية والحماية، أو يهمل في تزويد أسرته بمستلزماتهم، من طعام ولباس وفرش على الرغم من استطاعته القيام بذلك، فهذا الشخص المكلف بحماية أطفال الأسرة الصغار سواء كان والداً لهم أو ولياً أو وصياً عليهم، وامتنع أن يوفر له ولعائلته الطعام والكساء والفرش، يصبح محل إتهام وفق القانون الليبي، حيث أن المعيار الذي أخذ به المشرع هو في كون الطفل الذي لم يبلغ الثامنة عشر لا يستطيع أن يوفر لنفسه تلك الأشياء بمفرده، كونه قاصراً ولا يستطيع أن يعيل نفسه، ولا يستطيع أن يزود نفسه بهذه الاحتياجات ولا يستطيع حماية نفسه، نظراً لصغر سنه وطبيعة جسمه، فيأتي دور الوالد والولي أو الوصي هنا، والذي كلف قانوناً وشرعاً على أن يعول أسرته، ومن ثم إذا ما ارتكبت هذه الأفعال سواء على الزوجة أو الابناء فيعتبر الجاني قد اتبع مسلك يتنافى مع نظام الأسرة السليم وأخلاقها، وبذلك يكون شرط التخلي عن القيام

كما يجب عليه أن يقدم حساباً سنوياً مؤدياً بالمستندات عن إدارته لأموال القاصر قبل بداية كل سنة .²²²

ب) _ انتهاء الوصاية

تنتهي مهمة الوصاية على اموال القاصر فور بلوغ القاصر سن الرشد، إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه، ويجب على الوصي أن يسلم الأموال إلى القاصر عقب بلوغه سن الرشد خلال ثلاثين يوماً من انتهاء الوصاية .²²³

نصت الفقرة الأخيرة من المادة " 396 " على كل من جرد وسائل العيش فروع القاصرين أو العاجزين عن العمل أو أصوله أو زوجه مالم يكن قد انفصل عنه قانوناً دون خطأ منه.

حيث أن المقصود هنا من تجريد القاصر أو الزوج من وسائل العيش فروع القاصرين أو العاجزين عن العمل وفق ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان .²²⁴ والذي يكون بعدم اعطاء الشخص لأبنائه أو زوجته الحق في مستوى من المعيشة الكافية للمحافظة على صحة ورفاهية أسرته، من حيث توفير حياة كريمة لهم، ويتضمن أيضاً ذلك الحق في التعليم و التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وتأمين الرعاية لهم في حالة المرض أو

222 إذا كان من الممكن إعفاء الوصي من تقديم الحساب السنوي عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (45) فإن الحساب الذي يقدمه الوصي عند انتهاء الوصاية عملاً بنص المادة (50) من ذات القانون لا يعفى منه بحال، بل يتعين عليه تقديمه أيا كانت قيمة أموال القاصر المشمول بوصايته.

223 عملاً بنص (المادة 50) من القانون رقم (119) 1952 م .

224 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان صاغها ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948م. بموجب القرار 217 بوصفه أن المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، هو حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالمياً.

العجز أو الترمل، وغير ذلك من فقدان وسائل العيش التي يكون قادر عليها والتي من الممكن توفيرها .²²⁵

كما أن الولاية أساسها المصلحة، والمجنون والطفل لا يستطيع أن يعرف مصلحة نفسه، وتبعاً لذلك فلا يستطيع معاونة غيره في تحقيق أوجه المصلحة، وبذلك تنتهي الولاية على الطفل بزوال السبب الذي لأجله ثبتت الولاية على الطفل، والصغر ينتهي بالبلوغ ، والبلوغ قد يكون بالسنين وقد يكون بالعلامات، وأحكام الولاية على الطفل متناثرة في قوانين مختلفة كالقانون المدني وقانون الأحوال الشخصية وقانون رعاية الأحداث وقانون العقوبات وقانون حقوق الطفل وغيرها من القوانين، ولذلك لم ينل هذا الموضوع حظه من الدراسة والبحث مع أهميته وصلته بشريحة الأطفال التي يفترض أن تكون لها الأولوية والأفضلية والمصلحة الفضلى، كما أنه لم يتم جمع شتات هذا الموضوع المتشعب في مرجع واحد أو دراسة واحدة، وإضافة إلى هذا فإن موضوع الولاية على الطفل تتداخل معه كثير من المسائل والأحكام والمفاهيم، ومن ذلك تداخل الولاية مع الحضانة والكفالة والوصاية، ومع أن أحكام الولاية على الطفل قد تناثرت في قوانين كثيرة كما سبقت الإشارة إلى ذلك إلا أن هذه القوانين قد أغفلت بعض الأحكام المتعلقة بالولاية على الطفل مثل العلاقة بين الحضانة والولاية والكفالة وبيان مظاهر وحدود كل منها .²²⁶

225 الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة (25) (الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته) والمادة (26) والتي تنص (لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته) وجاءت المادة (27) بنصها (لكل شخص له الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة) .

226 عبد المؤمن شجاع الدين، *الولاية على الطفل*، دراسة فقهية قانونية مقارنة (اليمن : صنعاء، كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء، 2011م) 4 .

يرى الباحث بأن يجب وينبغي على الولي أن يعلم القاصر من أمور الدنيا ما يحتاج إليه من سباحة ورماية وغير ذلك مما ينفعه في كل زمان بحسبه.

كما يجب على الولي تأديب الصغير بالآداب الشرعية التي تغرس في نفسه الأخلاق الكريمة والسلوك القويم، وذلك لصيانته من قرناء السوء و نار الآخرة.²³⁴

حيث تجب أجره التعليم والتأديب في مال القاصر إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فعلى من تجب عليه نفقته، والإنفاق من مال الصغير لتعليمه الفرائض واجب بالاتفاق، كما يجوز أن يصرف من ماله أجره تعليم ما سوى الفرائض من القرآن، وغير ذلك مما يعود على القاصر بالنفع.²³⁵

ج. التخلص من علاج القاصرين من أفراد الأسرة

علاج الصغير وختانه الولاية فيها تكون للولي على النفس، لأن هذه الأشياء من أهم الأمور اللازمة للصغار لتعلقها بصحتهم وحياتهم، ويتحقق هذا بالإذن للطبيب في تقديم العلاج اللازم للصغار، والإذن في إجراء العمليات الجراحية لهم، وهذا كله خاص بالولي على النفس، أما إذا كانت هناك ضرورة ملحة في إجراء العمليات لإنقاذ حياتهم وتغيب الولي على النفس فللولي على المال الإذن في إجراء العملية، لأن ذلك من الواجب على كل مسلم إنقاذ حياة أي آدمي من عموم المسلمين، وهذا كله من لوازم النفقة التي تجب على الولي إذا لم يكن للصغير مال، أما إذا كان له مال فالأصل أن نفقة الإنسان في مال نفسه صغيراً أو كبيراً، وبذلك يتضح جلياً في

234 شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، معني المحتاج الى معرفة معنى الفاظ المنهاج، الجزء 1 (المغرب : البيضاء، دار الكتب العلمية، 1445هـ، 1994 م) 131 .

235 محمد أمين بن عمر ابن عابدين، فروع الفقه الحنفي رد المختار على الدر المختار، الجزء 5 (المغرب : البيضاء، دار الكتب العلمية، 1412هـ، 1992 م) 355 .

البلوغ، وأما عن مفهوم القاصر عند الفقهاء : فهو الذي لم يصل سن البلوغ، وبالتالي ينتهي هذا المفهوم فور خروج الشخص من حال الطفولة إلى غيرها .²⁴¹

عليه فقد اتفق الفقهاء على أن السن علامة من علامات البلوغ، و لم يخالفهم في ذلك سوى " داود الظاهري " حيث لم يعتبر السن من علامات البلوغ .²⁴²

اختلفوا في مقدار السن التي إن بلغها الصغير صار مكلفاً وذلك إلى ثلاثة مذاهب :

المذهب الأول: أن الصبي إذا أكمل خمس عشرة سنة صار بالغاً مكلفاً بالأحكام الشرعية، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية ورواية عن الإمام أبي حنيفة .²⁴³

المذهب الثاني: أن سن البلوغ في الذكر هو إتمام ثماني عشرة سنة، وهو مذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى .²⁴⁴

المذهب الثالث: إذا أتم كل من الذكر والأنثى ثماني عشرة سنة، فقد أدركا سن البلوغ، وجرى عليهما قلم التكليف، وهو المشهور عند المالكية .²⁴⁵

وفي رواية خلاف المشهور عندهم أنه إذا أتم كل من الذكر والأنثى ست عشرة سنة، فقد أدركا سن البلوغ .

سبب الخلاف : هو أنه إذا لم تظهر على الصغير علامة من علامات البلوغ وتقدم في السن فهل يبقى صغيراً ولا يجري عليه قلم التكليف مهما تقدم في السن، أم أن

241 محمد الخرشني أبو عبد الله علي العدوي، شرح الخرشني على مختصر خليل وبهامشه حاشية العدوي، الجزء 5 (مصر : المطبعة الأميرية الكبرى، 1317هـ) 291 .

242 موفق الدين بن قدامة، الفقه المقارن المغني، الجزء 4، 509 . اختلف في تاريخ وفاة داوود الظاهري، فمنهم من قال (متوفي 255 هـ) ومنهم من قال (متوفي 297هـ)

243 علاء الدين، الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 172 .

244 نفس المرجع، 172 .

245 محمد الخرشني، شرح الخرشني على مختصر خليل، 291 .

هناك سناً معينة لذلك، حيث اختلفوا في ذلك، لأنه المعيار الذي يحدد سن البلوغ منوط بالشخص نفسه وتركيبته وبذلك اعتبر الفقهاء البلوغ حداً فاصلاً بين مرحلتي التكليف وعدمها، في حالة انعدام ظهور شيء من هذه العلامات عليه.

أدلة المذهب الأول :

وهم القائلون بأن الصبي إذا أكمل خمس عشرة سنة صار بالغاً مكلفاً بالأحكام الشرعية، وقد استدلووا من السنة وذلك على النحو التالي :

1- ما روى عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه وأخذت منه الحدود))²⁴⁶.

وجه الدلالة : في الحديث دلالة واضحة انه سن البلوغ خمس عشرة سنة، وتعتبر حداً فاصلاً بين التكليف وعدمه، فالحديث صريح في أن المولود إن بلغ هذا السن جرى عليه قلم التكليف واستوفيت منه الحدود.

أدلة المذهب الثاني:

هم القائلون بأن سن البلوغ في الذكر هو إتمام ثماني عشرة سنة، وفي الأنثى سبع عشرة سنة فقد استدلووا من الكتاب: بقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾²⁴⁷. وجه الدلالة : حيث قد ثبت في الآية الكريمة بأن الشرع الحكيم قد علق حكم التكليف والخطاب بالاحتلام²⁴⁸.

246 أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، أخرجه في السنن الكبرى سنن البيهقي الكبرى، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الجزء 6 (المغرب : البيضاء، دار الكتب العلمية، 1424هـ، 2003م) 56 . وضعفه الألباني في الجامع الصغير، الجزء 1، 798 . أنس ابن مالك (المتوفي 91هـ)

247 سورة النور - الآية : 59

248 علاء الدين الحنفي، بدائع الصنائع، 172 .

أدلة المذهب الثالث:

هم القائلون بأنه إذا أتم كل من الذكر والأنثى ثماني عشرة سنة، فقد أدركا سن البلوغ وجرى عليهما قلم التكليف والبلوغ، فقد استدلوا بما استدل به أصحاب المذهب الثاني من أدلة، وقالوا أن في الغالب إن هذا السن هو الذي يتيقن فيه اليأس من الاحتلام.²⁴⁹

الترجيح:

عليه فإن الباحث يرجح أصحاب المذهب الأول، مذهب الجمهور القائل، بأن سن البلوغ عند الذكر والأنثى هو إتمامهما لخمس عشرة سنة، وذلك لقوة ما استدلوا عليه من أدلة تؤيد ما ذهبوا إليه.²⁵⁰

أ_ شروط الولي على مال القاصر عند الفقه الإسلامي

أنفق جمهور الفقهاء على بعض الشروط كالآتي:

1_ أن يكون الولي كامل الأهلية، بالغ عاقل حر راشد، لأن من فقد وصفاً من هذه الأوصاف كان فاقداً للأهلية، أو ناقصها فلا يكون أهلاً للولاية على مال نفسه، فمن باب أولى ألا يكون أهلاً للولاية على مال غيره، وكذلك يشترط في الولي أن يكون رشيداً، لأن السفیه ممنوع من التصرف في ماله، فيمنع من التصرف في مال غيره من باب أولى، وذلك لأن الولاية إنما تثبت لمن يقدر على تحقيق مصالح المولي عليه، وكل من الصغير والمجنون والسفيه ليس له من سلامة التفكير ما يلي أمر نفسه فلا يصح أن يلي أمر غيره.²⁵¹

249 محمد الخرشبي العدوي، شرح الخرشبي، 291 .

250 شمس الدين محمد الشافعي، مغني المحتاج، 166 .

251 علاء الدين الحنفي، بدائع الصنائع، 153 .

أ. جدول مقارنة لمحل تلك الجرائم بين القانون والفقهاء الإسلامي

محل الجريمة	من حيث القانون الليبي	من حيث الفقه الإسلامي
التصرف في اموال القاصر	<p>يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها ويبدل في ذلك عناية الشخص المعتاد، ولا يجوز له التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن من المحكمة ، كما لا يجوز له مباشرة التصرفات على اموال القاصر إلا بإذن من المحكمة وعدم توديع أموال القاصر في أحد المصارف بعد استبعاد النفقة ومصروفات الإدارة وذا ما تم ايداع تلك الاموال فلا يجوز أن يسحب من هذه الأموال إلا بإذن من المحكمة أو من النيابة العامة.</p> <p>كما يجب عليه أن يقدم حساباً سنوياً مؤدياً بالمستندات عن إدارته لأموال القاصر قبل بداية كل سنة. وهذا بخلاف ما اتفق عليه فقهاء الإسلام ، حيث اتفقوا على جواز أن يتولى الولي إخراج الزكاة من مال القاصر دون إذن منه ، لأنها عبادة مالية تجري فيها النيابة و الولي نائب الصبي فيها فيقوم مقامه في إقامة هذا الواجب</p>	<p>إن سلطة الولي تشمل إدارة أموال القاصر والتصرف فيها، ويعتبر ذلك واجباً عليه ويؤدي ذلك الواجب متوخياً المحافظة على تلك الأموال ورعايتها، ملتزماً بالأحكام التي يفرضها الشرع والقانون في هذا الشأن، ومن هذه السلطة أن يتولى الولي إخراج الزكاة ،لأنها عبادة مالية تجري فيها النيابة و الولي نائب الصبي فيها فيقوم مقامه في إقامة هذا الواجب .بخلاف العبادات البدنية كالصلاة والصيام، فإنها عبادات شخصية لا يجوز التوكيل فيها، والإنابة فلا بد أن يباشرها الإنسان بنفسه، إذا التعبد فيها واضح باحتمال المشقة البدنية امتثالاً لأمر الله تعالى فقد اتفق الفقهاء على أن الزكاة تجب في مال البالغ العاقل المسلم، إذا كان بالغاً للنصاب وزائداً عن حاجاته الأصلية</p>

<p>الفقه الإسلامي يرى بأن نفقة القاصر تجب في ماله إن كان له مال، وإلا وجبت على أبيه . وهذا بخلاف القانون الليبي الذي الزمه الزاماً قاطعاً فإن لم يكن لهم مال فيلزم بالإئفاق عليهم ممن تجب عليهم نفقتهم من قرابتهم، وعليه فإن للولي أن ينفق عليهم بالمعروف من غير إسراف و إقتار.</p> <p>واتفقت المذاهب الأربعة على الآباء وسائر الأولياء يجب عليهم تعليم الصغار وتوفير ما يلزمهم قبل وبعد البلوغ بخلاف القانون الليبي الذي يسن في مدوناته في هذا الامر ما قبل البلوغ أما ما بعد البلوغ فليس للولي حق في النفقة عليه الا بالمعروف ومن باب الاحسان فيعلم الصغير ما تصح به عقيدته من إيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر، وما تصح به عبادته ويعرفه ما يتعلق بصلاته وصيامه و طهارته ونحوهما.</p>	<p>تقع هذه الجريمة وفق القانون الليبي بأن يرفض الوالد أو الولي أو الوصي تقديم هذه المستلزمات، كأن يرفض أن يقدم له الرعاية والعناية والحماية أو يهمل في تزويد أسرته بمستلزماته، من طعام ولباس وفرش على الرغم من استطاعته القيام بذلك، فهذا الشخص المكلف بحماية الأسرة والطفل الصغير سواء كان والداً له أو ولياً أو وصياً عليه ويمتنع ويرفض أن يوفر له ولعائلته الطعام والكساء والفرش يصبح محل إتهام وفق القانون الليبي حيث إن المعيار الذي أخذ به المشرع في كون الطفل الذي لم يبلغ الثامنة عشر لا يستطيع أن يوفرها لنفسه بمفرده كونه قاصراً و لا يستطيع أن يعيل نفسه، ولا يستطيع أن يزود نفسه بهذه الاحتياجات ولا يستطيع حماية نفسه نظراً لصغر سنه وطبيعة جسمه</p>	<p>نفقة طعام الأسرة والقصر وشرابهم وكسوتهم وغير ذلك</p>
<p>ليس للولي سلطة في مباشرة التصرفات الضارة بالمولى عليه ضرراً محضاً، كالتبرع من مال القاصر بالهبة أو البيع أو الشراء بغبن فاحش، فيكون تصرفه باطلاً، وله مباشرة التصرفات النافعة نفعاً محضاً كقبول الهبة والصدقة والوصية وكذا التصرفات المترددة</p>	<p>أن المشرع الليبي أخذ بمعايير خاصة عند اختيار الوصي وجعل للنيابة العامة حق في الاشراف على أعمال الأوصياء وتراقب تصرفاتهم وإداراتهم لأموال القصر لتحقيق مصالحهم، فهي تتحرى الدقة في اختيار الوصي ولها الحق في التصدي لما قد يتعارض مع</p>	<p>تبذير أموال القاصر</p>

<p>بين الضرر والنفع كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار والشركة وهذا بخلاف القانون الليبي الذي أعتبر لا يجوز التصرف في أموال القاصر سواء كانت محل نفع أو ضرر فقال الحنفية يجوز للولي العدل المحمود السيرة عند الناس، أو مستور الحال أن يبيع شيء ملك للقاصر كالعقار وغيره وقال المالكية : إنه يجوز للولي أن يتصرف في مال القاصر بالمصلحة، وهذا بخلاف المذهب الشافعي الذي وافق القانون الليبي بأنه لا يجوز التصرف في الأموال على هذا النحو، أما عن المذهب الحنبلي فقد أكتفى بالقول أن وجدت مصلحة للقاصر في البيع يجوز.</p>	<p>مصالح القصر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحهم وأموالهم، ولها أن تتخذ إجراءات عزل الأوصياء من تلقاء نفسها والتحقيق معهم في شأن ما قد يضر بأموال القصر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية إذا كان مثل فعلهم يعد جريمة تضر بأموال القصر، وتتحرى بالدقة فيما يبيده من أقوال وما يقدمه من مستندات، وتبحث مصلحة القصر في فعل الوصي ومدى توافر مصلحة القاصر في بقاء الوصي عليه قائما بالوصاية وتعد مذكرة برأيها في شأنه تقوم بعرضها على المحكمة لإصدار القرار المناسب.</p>	<p>تذير أموال القاصر</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

ب. موقف قانون الأحوال الشخصية الليبي من تلك الجريمة

أما عن موقف قانون الأحوال الشخصية الليبي الذي يعتبر مسألة تنظيمية لتلك الجرائم عند حدوثها، رغم إنه لم يجرم ولم يصدر قوانين عقابية لها، ف جاء شارحاً للأحوال استناداً ودعماً للقضاء في تحديد الجريمة عند قانون العقوبات، وبذلك تأتي نصوصه على شكل هيكل ينظم الأمور الخاصة بالأسر، ولعل تلك المواد منه توضح ما يعنيه الباحث من تلك الهياكل، ويجد الباحث أن نص ذلك القانون له كل الارتباط بتلك الجرائم، وللباحث في هذا الصدد أن يذكر تلك المواد المتعلقة والمرتبطة في هذا الشأن كالآتي :

في نفسي شيئاً ما سمعته أذناي فقال صلى الله عليه وسلم، قل وأنا أسمع، ثم قال :

قلت: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أدني إليك وتنهل

إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت *** لشكواك إلا ساهرا أتململ

كأني أنا المطروق دونك بالذي *** طرقت به دوني وعيني تمهل

فلما بلغت السن والغاية التي *** إليها مدى ما كنت منك أوئل

جعلت جزائي منك جبها وغلظة *** كأنك أنت المنعم المتفضل

فليتك إذ لم ترع حق أبوتي *** فعلت كما الجار المجاور يفعل

فأوليتني حق الجوار ولم تكن *** علي بمال دون مالك تبخل

حتى قيل حينئذٍ أن النبي عليه السلام أخذ بتلابيب ابنه وقال " أنت ومالك لأبيك "

وهذا ما يراه الباحث أيضاً ويتفق فيه مع بعض فقهاء الفقه الإسلامي، على الرأي

القائل، بأن نفقة القاصر تجب في ماله، ولا يعتبر أخذ ذلك المال أو التقصير في

نفقته من الجرائم، وإلا وجبت على أبيه كما بينها الباحث سابقاً، وهذا بخلاف القانون

الليبي الذي الزمه الزاماً قاطعاً والا كانت جريمة جنائية عوقب عليها، وعليه فإن

الباحث يرى أن التقصير في القيام بالواجبات الأسرية ليست جريمة من حيث

الشريعة وإن تعددة الجرائم فيها من حيث القانون.

كما يرى الباحث أيضاً أن المبدأ يتشابه الى حد ما، ما بين الرأي المستند عليه

جمهور الفقهاء، وما بين ما أستند عليه القانون الليبي في الزام الآباء وسائر الأولياء

بتعليم الصغار وتوفير ما يلزم لهم قبل وبعد بلوغهم السن القانونية، وحيث من باب

الاحسان لهم بوجوب بأن يعلمونهم ما تصح به عقيدتهم من إيمان بالله وملائكته

(ا) كل من ضرب شخصاً دون أن يسبب له مرضاً، يعاقب بناء على شكوى الطرف المتضرر، بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً أو بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهاً. ²⁷⁶

(ب) يعد الإيذاء الشخصي جسيماً ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه إذا توافر أحد الطرفين الآتين :

1- إذا نجم عن الإيذاء مرض يعرض للخطر حياة المعتدى عليه أو يعرضه للعجز عن القيام بأعماله العادية مدة لا تزيد على أربعين يوماً.

2- إذا وقع الفعل على الحامل ونجم عنه تعجيل الوضع. ²⁷⁷

(ج) يعد الإيذاء الشخصي خطيراً ويعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا نشأ عن الفعل :

1_ مرض لا يرجى الشفاء منه أو يحتمل عدم الشفاء منه.

2_ فقد حاسة من الحواس أو إضعافها إضعافاً مستديماً.

3_ فقد أحد الأطراف أو الأعضاء أو إضعافه إضعافاً مستديماً أو فقد منفعتة أو فقد القدرة على التناسل أو صعوبة مستديمة جسيمة في الكلام.

4_ تشويه مستديم في الوجه.

5_ إجهاض الحامل المعتدى عليها. ²⁷⁸

حيث أن المشرع الليبي لم يكتفى بنتيجة هذه الشروط لكي يصبح الفعل مجرمًا، وإنما أخذ بشرط شكوى الطرف المتضرر لكي يصبح الجاني محل إتهام، وهذا ما

276 قانون العقوبات الليبي، الجرائم العامة، 1953م، المادة المتعلقة بالضرب " 378 "

277 نفس المرجع، المادة (380) الإيذاء الجسيم

278 نفس المرجع، المادة (381) الإيذاء الخطير

يرى الامام أحمد الغزالي، بأن هذه الوسائل اذ لم تطبق بالشكل الصحيح تصبح وسائل تشفي وانتقام بدلاً من أن تكون وسائل اصلاح وتربية وتعديل سلوك، ويضيف عليها بعض الشروط، بأن لا يكون الضرب إلا على ذنب، وأن يكون الضرب ضرباً غير مبرح، والا يترك عاهة والا يجرح عضواً والا يكره، والا يكون على الوجه والا يكون على الرأس وأن تكون آلة الضرب مألوفة، أي أن تكون رطبة معتدلة الحجم، ليس لها تأثير جسدي يسبب له إيذاء جسيم .²⁸³

يرى الباحث بأنه يجب على الاباء أن يتعاملوا مع أبنائهم بكل رحمة، ولا يعتدوا على أطفالهم بالضرب والقسوة، فالأب المعتدي على اطفال أسرته أشد جرماً من الاجنبي، لأن هذا الاعتداء جاء من مسؤول عن أمن أسرته وأطفاله، وبذلك لم يجد الباحث أن الفقه الإسلامي قد اشترط شكوى الطرف المتضرر في الجريمة، واعتبر الفعل مجرم بمجرد حصول النتيجة وأصر جمهور الفقهاء على أن الجاني يجب عليه الأخذ بعين الاعتبار الشروط السابقة في التربية والتأديب، ردعاً له وهذا ما جاء به الإسلام رحمةً ومودتاً، حيث جاء في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنه، يقول، حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن يزيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((كلكم راع وكلكم مسؤول فالإمام راع

283 سمر خليل محمود عبدالله، حقوق الطفل في الاسلام، 137 . الإمام أحمد الغزالي (المتوفى 1416هـ) عالم ومفكر إسلامي مصري، يعد أحد دعاة الفكر الإسلامي في العصر الحديث، عُرف عنه تجديده في الفكر الإسلامي وكونه من "المناهضين للتشدد والغلو في الدين" كما يقول أبو العلا ماضي كما عُرف بأسلوبه الأدبي الرصين في الكتابة واشتهر بلقب أديب الدعوة. سببت انتقادات الغزالي للأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي العديد من المشاكل له سواء أثناء إقامته في مصر أو في السعودية. بعد تخرجه عمل إماماً وخطيباً في مسجد العتبة الخضراء ثم تدرج في الوظائف حتى صار مفتشاً في المساجد، ثم واعظاً بالأزهر ثم وكيلاً لقسم المساجد، ثم مديراً للمساجد، ثم مديراً للتدريب فمديراً للدعوة والإرشاد. وله العديد من المؤلفات الفقهية وغيرها ، وفي (1391هـ، 1971م) أعير للمملكة العربية السعودية أستاذاً في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ودرّس في كلية الشريعة بقطر، وفي (1401هـ، 1981م) عين وكيلاً لوزارة الأوقاف بمصر .

وهو مسؤول والرجل راع على أهله وهو مسؤول والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول ((. 284

أ. جدول مقارنة بين القانون الليبي والفقهاء الإسلاميين

محل الجريمة	من حيث القانون الليبي	من حيث الفقه الإسلامي
الاستعمال الغير مشروع لوسائل الإصلاح والتربية (العنف العائلي)	لم يجرم القانون الليبي اتجاه ارادة الوالدين نحو القيام بإساءة استعمال وسائل الإصلاح والتربية الا بالعنف العائلي و لا يعتبر هذا الفعل في القانون الليبي جريمة الا بعد النظر للنتيجة المتعلقة بالفعل و قيد هذا الركن بشرط تعرض القاصر أو الابن لمرض في الجسم أو في العقل وأن يجب على الثاني تقديم شكوى الا وهو الطرف المتضرر.	ما ذاهب اليه جمهور من الفقهاء كالإمام أحمد الغزالي على تجريم هذا الفعل والذي خالفت القانون الليبي بأن لا تأخذ بشكوى الطرف المتضرر كنتيجة لهذا الفعل ككون المجني عليه قاصراً لم يبلغ سن الرشد واتفقت مع القانون الليبي في شروط النتيجة المتعلقة بالفعل من حيث تعرض القاصر لمرض في الجسم أو في العقل أو تعرضه لعاهة مستديمة.

ب. موقف قانون الأحوال الشخصية الليبي من تلك الجرائم

أما عن موقف قانون الأحوال الشخصية الليبي فهو لم يتطرق الى سوء استعمال وسائل الإصلاح والتربية ولم يتطرق الى الضرب كجرمه تتبعه وإنما ترك لقانون العقوبات الليبي سن القوانين الخاصة بهذا الشأن، فقانون العقوبات الليبي ينظر الى الأسرة على أنها شيء مقدس ويجب أن تحمي جنائياً في تلك الجريمة، وأكتفى في المادة الثامنة عشرة منه في حق الزوج على زوجته في الفقرة الرابعة والخامسة منها

284 محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح، 1988م . رقم الحديث 4892 .

5_ إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال في منظور قانون العقوبات الليبي

ينص قانون العقوبات الليبي على إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال بنصه :
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يعاقب بالحبس كل من أساء معاملة أحد أفراد أسرته
أو صغير دون الرابعة عشرة أو أي شخص آخر خاضع لسلطته أو معهود إليه به
لتربيته أو تثقيفه أو رعايته أو لتدريبه على مهنة أو فن، وإذا نجم عن الفعل أذى
شخصي زيدت العقوبة بقدر النصف فإذا نجم عنه الموت كانت العقوبة السجن .²⁸⁸

مكررة " أ " كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجيه أو
أصوله أو فروعه أو إخوته أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع
مع قدرته عليه مدة شهر بعد التنبيه عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .²⁸⁹

وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون العقوبة الحبس مدة
لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم
عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة عليه.

مكررة " ب " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين
جنيهاً كل من امتنع عن تسليم صغير إلى من له الحق في طلبه، بناء على حكم
قضائي أو قرار صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك كل من خطفه بنفسه أو
بواسطة غيره، ممن لهم بمقتضى الحكم أو القرار حق حضانته أو حفظه ولو كان
ذلك بغير تحايل أو إكراه .²⁹⁰

288 قانون العقوبات الليبي، الجرائم العام، الفصل الثاني، الباب الأول الجرائم المتعلقة بالأسر، المادة " 398 "

289 نفس المرجع، الفصل الثاني، المادة " 398 " مكررة (أ)

290 نفس المرجع، الفصل الثاني، المادة " 398 " مكررة (ب)

تعتبر جريمة إساءة معاملة أفراد الأسرة، من الجرائم العمدية التي يتطلب لقيامها توفر القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة، لذا فإنه يجب لقيام هذه الجريمة أن يعلم الجاني أن فعل الإساءة هذا الذي قام به دون مسوغ قانوني مشروع، قد يلحق ضرراً فادحاً بهذا الطفل المجني عليه، أو سيسبب له ضرراً مستديماً لصحته كإصابته بمرض من الأمراض المزمنة أو موته.²⁹³

يرى الباحث بأن الغالب أن يكون التأثير الإجرامي للأسرة على شخصية الطفل غير مباشر، كما أشار له، سلمان عبدالله في كتاب أصول علم الأجرام والجزاء، فمن خلاله فقد رأينا أن منزل الأسرة هو الموطن الأول الذي يعيش الطفل فيه سنواته الأولى، حيث يبدأ فيه بناء هيكل شخصيته، ولذلك فإنه يتأثر بكل ما يمر من حوله، وأول عناصر هذا الهيكل هو تكوين الضمير الأخلاقي للطفل، والتي تحتوي على المبادي السامية، والقيم الدينية والخلقية والاجتماعية، كما أن من أهم عناصر هيكل شخصية الطفل هي تطوير ملكات الجانب العاطفي لديه، من خلال المعاملة الحسنة، ولا شك في أن دور الأبوين في هذا المجال هو دور أساسي وحاسم.²⁹⁴

الفقرة الثانية : الامتناع عن دفع نفقه أو أجره الحضانة بعد صدور حكم نهائي :
لقد وضع الباحث في الإطار النظري سابقاً أن نفقة الزوجة والأسرة واجبه شرعاً وقانوناً على الزوج سواء كان موسراً أو معسراً، رغم أن هناك من خرج عن هذا الإجماع.

293 عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام الجريمة (الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية، 1998م) 231 .
القصد الجنائي : أشار قانون العقوبات الليبي في كثير من مواده إلى القصد الجنائي دون أن يشير إلى تعريفه كغيره من قانون العقوبات على وجه العموم، وقد حاول الفقه القيام بهذه المهمة فقبل بتعريفات عديدة لا تختلف في مضمونها إذ تدور حول نقطتين، الأولى: وجوب أن تتوجه الإرادة إلى ارتكاب الجريمة، و الثانية : ضرورة أن يكون الفاعل على علم بأركانها فإذا تحقق هذان العنصران معا (العلم و الإرادة) قام القصد الجنائي و بانتفائهما أو انتفاء أحدهما ينتفي القصد الجنائي، ينظر فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات الليبي، 450 .
294 سليمان عبد المنعم، أصول علم الإجرام، 399 .

يقصد المشرع الليبي بالحكم النهائي، هو الذي أستكمل كافة طرق الطعن ولا يقبل إعادة النظر فيه، حيث الحكم الجنائي قليل الحصول من الناحية الواقعية، وذلك نظراً لما استوجبه المشرع من شروط وحالات معينة لإجازته، حتى غن الحديث عنه من الناحية القانونية يكاد يكون هو الآخر قليل، بل إنه منذ إنشاء المحاكم الليبية تعد الطعون المقدمة بإعادة النظر نادرة جداً.²⁹⁶

حيث يرى البعض أن الحكم النهائي يعني الحكم البات، أي غير القابل للطعن بأي طريقه، وهو ما يجري به الواقع، في حين يكفي البعض الآخر بكونه الحكم غير القابل للطعن بالطرق العادية فقط، بحيث يجيزون هذا الطلب و لو كان الحكم قابلاً للطعن بالنقض أو مطعون فيه بالنقض فعلاً.

الأمر الذي كان يتعين معه على المشرع الجنائي تحديد مصطلحاته التي يستخدمها تحديداً منضبطاً ومتفقاً مع طبيعة وغاية الموضوع الذي يتحدث عنه كل في نطاقه، لاسيما إذا كانت هناك عدة مصطلحات في الموضوع الواحد ولكل منها معنى مغاير للآخر، كما هو الحال في الموضوع الراهن.²⁹⁷

الفقرة الثالثة : الامتناع عن تسليم صغير إلى من له الحق في حضانته أو حفظه بناء على حكم قضائي :

(أ) -توافر القصد الجنائي

اشتراط المشرع الليبي أن يكون قرار التسليم صادر بناء على قرار أو حكم من جهة القضاء بشأن حضانته أو حفظه، لأن الأحكام هي عنوان الحقيقة، كما إنها

296 محمد خميس ابراهيم، الإخلال بحق المتهم في الدفاع (رسالة دكتوراة-- جامعة الإسكندرية، 2000م) 245 .

297 عبد الحكم فودة، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها، في ضوء الفقه وقضاء النقض (مصر: الإسكندرية، دار المعارف، 2007م) 19 وما بعدها. و أحمد فتحي سرور، الخطر المزدوج وحجية الأحكام، مجلة إدارة قضايا الحكومية، عدد 4، 48 . محمد محي الدين عوض، القانون الجنائي و اجراءاته، الجزء 1، 257 .

المذهب الحنبلي : يرى هذا المذهب بأن يكون خاصا بالزوجين دون غيرهما، باستثناء ابنه الذي لم يبلغ سنّ التمييز، فإذا كان مشغولاً بسكنى أحدٍ مَهَمًا كان قريباً، فإنّه لا يعد سكناً شرعياً، حيث لا تحقق فيه الزوجة حرّيتها الكاملة، وأن يكون المسكن مأموناً، وإلا فلا يعدّ مسكناً على الإطلاق، بل أنّ مظاهر الأمن فيه أنّ يكون بين جيران صالحين، حتى تكون الزوجة آمنةً فيه على نفسها ومالها، ويلاحظ أنّه إذا كان متزوجاً بأخرى، فإنّ وجود هذه الزوجة في مسكنٍ مُجاور لها يعدّ إخلالاً بشرعية المسكن إذا كانت تتأذى من وجودها .³¹⁰

حيث إنّ أعد لها مسكنها بالشروط السابقة، وجب عليها الاستقرارُ فيه، ولا تخرج منه إلا بإذنه، أمّا إذا امتنع عن إعداد هذا المسكن، أو أعدّ مسكناً لا تتوافر فيه الشروط السابقة، فإنّ من حقها أن تطالبه بأجرة مسكن شرعي.

المذهب الشافعي : يرى المذهب الشافعي بأن يجب على الوالد وإن علا نفقة ولده، وإن سفل، فالأب مكلف بالإنفاق، على أولاده ذكوراً وإناثاً، فإن لم يكن لهم أب، كلف بالإنفاق عليهم الجد أبو الأب القريب، ثم الذي يليه، ودليل ذلك من الكتاب قول الله عز وجل ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ .³¹¹

واستدلوا من السنه : عن عائشة رضي الله عنها، أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، فقال، " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " يقصد: خذي من مال أبي سفيان .³¹²

310 محمد شلبي، أحكام الأسرة، 185 .

311 سورة الطلاق - الآية: 6

312 يحيى بن شرف أبو زكريا النووي، شرح النووي على مسلم، الجزء3 (بيروت : دار الخيزر، 1416هـ، 1996م) باب قضية هند، رقم الحديث 1714 .

المذهب الحنفي : يرى المذهب الشافعي بأن يجب أن لا تكون الزوجة مرتدة، فإذا ارتدت سقطت نفقتها، وهذا بخلاف ما إذا كانت ذمية تحت مسلم، فإنها تجب لها النفقة سواء كانت نفقة زوجية أو عدة فإذا تابت المرتدة وأسلمت وهي في العدة فإن نفقتها لا تعود بخلاف الناشزة، وذلك لأن ربتها ترتب عليها فرقة جاءت من قبلها فأبطلت نفقتها، ومتى بطلت النفقة بالفرقة فإنها تعود بخلاف النشوز فإنه أمر عرضي يوقف النفقة ولا يبطلها . فإذا كانت مطلقة وخرجت بدون إذنه وهي في العدة، فإن نفقتها لم تبطل بالنشوز فإذا عادت إلى الطاعة عادت لها النفقة وإذا طلق امرأته وارتدت وهي في العدة سقطت نفقة عدتها ولو عادت وأسلمت فإن نفقتها لا تعود، وبنفس الأدلة السابقة.³¹³

أما فيما يتعلق بالفقرة الرابعة والأخيرة في شكوى الطرف المتضرر، فقد اتفق فقهاء الفقه الإسلامي، على أنها ليست جائزه في الإسلام، وهذا ما يخالف القانون الليبي، حيث أنهم استدلوا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام في لفظ أحمد وأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال : أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً، وهذا ما ذهب اليه الباحث حيث يرجح رأى جمهور الفقهاء في كون شكوى الطرف المتضرر على أنها ليست جائزه في الإسلام، بدليل ما روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث.³¹⁴

313 عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء 4 (لبنان : بيروت، دار الكتب العلمية، ط2، 1424هـ، 2003م) 271 . (المتوفى: 1360هـ) .

314 أبو سليمان الخطابي، تحفة الأحوذى في شرح جامع الترمذي، المحقق، محمد راغب الطباخ (لبنان : بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1351هـ، 1932م) رقم الحديث 1369 .

أ. جدول مقارنة في تلك الجرائم بين القانون والفقهاء الإسلامي

محل الجريمة	من حيث القانون الليبي	من حيث الفقه الاسلامي
إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال	تعتبر جريمة إساءة أفراد الأسرة من الجرائم العمدية التي يتطلب لقيامها توفر القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة، لذا فإنه يجب لقيام هذه الجريمة أن يعلم الجاني أن فعل الإساءة هذا الذي قام به دون مسوغ قانوني مشروع يلحق ضرراً فادحاً بهذا الطفل المجني عليه، أو سيسبب له ضرراً مستديماً لصحته كإصابته بمرض من الأمراض المزمنة أو موته	أن تكون من الجرائم العمدية هذا غير متفق فيه عند فقهاء المذاهب الأربعة إلا أن من الأرجح من المحتمل أن الكثير من الأسر التي تسيء معاملة الأطفال وقعت ضحية لدائرة من العنف المتوارث فنجد أن الأب والأم تعرضوا لمثل هذا التصرف عندما كانوا صغاراً حيث يميل الناس إلى التعامل مع أطفالهم بنفس الطريقة التي عوملوا بها عندما كانوا صغاراً. ودون توفر القصد الجنائي وهذا بخلاف القانون الليبي
الامتناع عن دفع النفقة أو أجرة الحضانة بعد صدور حكم نهائي	إذا رفعت الزوجة دعوى لتسديد النفقة و اقتنعت المحكمة بطلباتها وفقا لما قدمته من بيانات و أدلة لتدعيم طلبها قضت على الزوج بتقديم النفقة المستحقة فإن امتنع الزوج عن تنفيذ الحكم و عودته على الإنفاق على زوجته كالمعتاد من حقها إذن أن تبلغ وكيل النيابة بنسخة من الحكم ليتابعه بجريمة الامتناع عن تقديم نفقة مقررة قضاءً، حيث أن الجريمة المقررة للزوج الممتنع عن النفقة المحكوم بها تعتبر جريمة الإهمال العائلي أو ترك الأسرة و صنفها المشرع الليبي	أن الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة عند الفقه الاسلامي بأن يُرفع أمره إلى القضاء مرة أخرى؛ للنظر فيه، فإن كان قادراً على الوفاء أمره بذلك، فإن أدى ما عليه أُخلى سبيله، وكذلك يخلى سبيله إذا أحضر كفيلاً يضمن أداء المبلغ المحكوم به عليه، وهذا بخلاف القانون الليبي أما إذا امتنع عن الوفاء ولم يُوجد من يكفله، فإن المحكمة تأمر بحبسه لمدة لا تزيد عن شهر، على أن يخلى سبيله في أي لحظة يقوم فيها بالسداد أو بتقديم كفيل. وهذا ما ذهب اليه

<p>المذهب المالكي ، واتفقت معه جميع المذاب الاخرى الا المذهب الحنبلي الذي رأى إن كانت المرأة ناشزاً، فلا نفقة لها.</p>	<p>على إنها إساءة الأسرة والأطفال على أنها جناية.</p>	
<p>أوجب الإسلام الحضانة للصغار وجعلها لكلا الزوجين بدون رفع الأمر للحاكم فاستحق الزوج النفقة واستحقت الام الحضانة وهذا باتفاق المذاهب الأربعة بالعموم شريطة أن تكون أمينة على الصغار حريصة على الدين والخلق. فإذا كانت سيئة الخلق ولا تؤمن على الصغير لم تسند حضانته لها.</p>	<p>اشتراط المشرع الليبي ان يكون قرار التسليم صادر بناء على قرار أو حكم من جهة القضاء بشأن حضانته أو حفظه لان الأحكام هي عنوان الحقيقة كما انها تمحص وقائع الدعوى ولا تصدر حكماً الا بعد تيقنها أن الاب غير جدير بالاحتفاظ بالابن وان مصلحة الابن ان يسلمه الأب الذي اصبح في نظر المحكمة غير جدير ببقاء الابن معه وان الاستمرار معه هو ضرراً للابن.</p>	<p>الامتناع عن تسليم صغير إلى من له الحق في حضانته أو حفظه</p>
<p>اتجه فقهاء الفقه الإسلامي على الرأي الراجح أن شكوى الطرف المتضرر ليست واجبه لكي تتحقق الجريمة فمجرد الاساءة لإفراد الأسرة يجرم الفعل وهذا ما يخالف القانون الذي جعل شرط رفع الدعوى ركن أساسي لتحقيق الجريمة</p>	<p>شكوى الطرف المتضرر في القانون الليبي ركن أساسي لتحقيق الجريمة ورفع الدعوى وبالتالي أن النيابة العامة هي التي تملك سلطة تحريك الدعوى العمومية دون غيرها لأنها هي التي تمثل المجتمع، و تتوب عن المجني عليهم في متابعة الجناة المجرمين وفي المطالبة بتوقيع العقوبات عليهم .</p>	<p>شكوى الطرف المتضرر</p>

ج. مناقشة الباحث للتحليل والنقد لتلك الجرائم

يتفق الباحث مع الرأي القائل بأن هذه الجريمة من أخطر الجرائم التي تهدد حياة الطفل بشكل خاص، وتهدد الأسرة والعائلة بشكل عام، وينتقد الباحث في كون السبب المؤدي لها هو نتيجة فعل التفكك الأسري، غير أن القانون الليبي يعتبر بأن تلك الجريمة من الجرائم العمدية التي يتطلب لقيامها توفر القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة.

ينتقد الباحث كون فعل الإساءة هذا يتطلب على الجاني قبل وقوعه دون مسوغ قانوني مشروع بأنه يلحق ضرراً فادحاً بهذا الطفل المجني عليه، أو سيسبب له ضرراً مستديماً لصحته كإصابته بمرض من الأمراض المزمنة أو موته.

يستند الباحث مع رأي جمهور الفقهاء في ذلك، حيث أن تكون تلك الجريمة من الجرائم العمدية هذا غير متفق فيه عند فقهاء المذاهب الأربعة ويذهب مع الرأي الراجح الذي يرى بأن الكثير من الأسر التي تسيء معاملة الأطفال وقعت ضحية لدائرة من العنف المتوارث، وإنهم تعرضوا لمثل هذا التصرف عندما كانوا صغاراً حيث يميل الناس إلى التعامل مع أطفالهم بنفس الطريقة التي عوملوا بها عندما كانوا صغاراً ودون توفر أي قصد جنائي.

أما من حيث شكوى الطرف المتضرر فإن القانون الليبي جعله ركن أساسي لتحقيق الجريمة ورفع الدعوى، وهذا ما لا يتفق فيه الباحث معه، وبالتالي فإن النيابة العامة هي التي من المفترض أن تملك سلطة تحريك الدعوى العمومية دون غيرها، حيث إنها تمثل المجتمع، و تنوب عن المجني عليه في متابعة الجناة المجرمين وفي المطالبة بتوقيع العقوبات عليهم.

يتفق الباحث مع رأي جمهور الفقهاء الذي يرى بأن شكوى الطرف المتضرر ليست واجبه لكي تتحقق الجريمة، حيث بمجرد الاساءة يجرم الفعل وهذا ما يخالف القانون الذي جعل شرط رفع الدعوى ركن أساسي لتحقيق الجريمة.

إذا ما تأمل القارئ في مسألة الامتناع عن دفع النفقة في حالة ما إذا رفعت الزوجة دعوى و اقتنعت المحكمة بطلباتها وفقا لما قدمته من بيانات، لوجد أن الجريمة المقررة للزوج الممتنع عن آدائها تسمى في القانون " الإهمال العائلي " أو ترك الأسرة و صنفها المشرع الليبي على أنها جنائية تدخل تحت النص القانون المتعلق بجريمة إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال.

ينتقد الباحث المشرع الليبي في كون اعتبار الفعل جنائية، حيث من المعروف أن ذلك الإهمال أو التقصير في ذلك الفعل يدخل تحت قانون الأحوال الشخصية و لا ترتقي تلك الأفعال الى أفعال جنائية.

يرى الباحث أن ما ذهب اليه جمهور الفقهاء هو الأقرب للصحيح، في كون الزوج ما إن كان قادراً على الوفاء و أدى ما عليه في زمن ليس بالقريب، فهنا لا يجرم الفعل فيه، حيث يعتبر هذا الفعل من باب التأخير أو باب الحرص على الوفاء، وليس من باب التعمد في عدم السداد، حيث ما إذا تم النظر في نصوص قانون العقوبات الليبي لوجدناها مجحفة نوعاً ما في كونها أعطت القاضي سلطة تقديرية في الفصل في هذا الشأن، وفي جميع تلك الأحوال يتفق الباحث مع الرأي الأرجح والأقرب للصواب، رغم أن الانتقادات التي وجهها الباحث لا تعتبر جرح لهذا القانون وإنما تعتبر داعمه له لتطويره ومعالجته وتحديثه وإدخال التعديلات عليه بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.

ب. المبحث الثاني / العقوبات القانونية لجرائم الأسر وتوافقها مع الشريعة الإسلامية

1_ عقوبة الجرائم المتعلقة بالتقصير في القيام بالواجبات العائلية عند قانون العقوبات الليبي

نصت المادة 396 من قانون العقوبات الليبي فيما يتعلق بعقوبة جرائم التقصير في القيام بالواجبات العائلية على أن : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيهاً كل من تخلص من القيام بالواجبات الإعانة المترتبة على مكانته الأبوية، الى آخر المادة كما ذكرها الباحث سابقاً، ومن ثم نص في بداية الفقرة الثانية من المادة بأنه العقوبة تزداد الى النصف اذا ارتكب الفاعل بعض الأفعال المنصوص عليها والمتمثلة في سلب وتبذير اموال الأبن القاصر، واموال من له وصاية عليه، أو جرد من وسائل العيش أحد أصوله أو احد فروعها، وجاءت المادة 398 مكرر " ج " من نفس القانون مكملة للعقوبة بقولها لا تقام الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في المواد 396 و 397 و 398 مكرره " أ " و 398 مكررة " ب " الا بناء على شكوى الطرف المتضرر.

بالتالي اذا اشتكى الطرف المتضرر وفق القانون الليبي في إحدى تلك الجرائم المنصوص عليها سابقاً فيحق له العدول والتنازل عن الدعوى وقت سريانها، وفي حالة ما تم التنازل من طرف المجنى عليه، فعلى القاضي الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.

من خلال النصوص السابقة والمعطيات يمكن تحليل وتقسيم العقوبات التي تصدر عن جرائم التقصير في القيام بالواجبات العائلية وفق القانون الليبي الى ثلاثة عقوبات رئيسيه والتي تدخل بشكل مباشر بموضوع الأطروحة كما هو في الآتي :

وبذلك نجدها وفق القانون الليبي تتمتع بخصائص أسوة بغيرها من صور الجزاء الجنائي والتي تتمثل في الآتي :

1_ شرعية الغرامة : وتكون كجزاء لفعل يعتبر جناية أو جنحه أو مخالفة، فهي تخضع كغيرها من الجزاءات الجنائية لمبدأ شرعية العقوبة، فلا يجوز الحكم بها الا بمقتضى نص في القانون الذي يجيز ذلك، ولا يجوز تطبيقها بأثر رجعي، ومن جانب آخر لا يجوز للقاضي أن يحكم بغرامة غير المنصوص عليها أو تخالف الحدود التي بينها نص قانوني .

2_ قضائية الغرامة : وتكون أسوة بغيرها من العقوبات الجنائية، والتي تخضع لمبدأ قضائية العقوبة، فأمر توقيعها منوط للقاضي، وعليه أن يتقيد بكافة القواعد المقررة في قانون الاجراءات الجنائية، وله في هذا الشأن سلطة الحكم بالوقف في تنفيذ العقوبة .³²⁶

3- شخصية الغرامة : لا تصيب الغرامة وفقاً لمبدأ شخصية العقوبة سوى مرتكب الجريمة، ومعنى ذلك أنه لا يجوز توقيعها على الورثة، الا أن اغلب الفقهاء في فرنسا يذهبون الى اعتبار الغرامة ديناً مدنياً ينتقل من ذمة المحكوم عليه الى الورثة من بعد موته، وهذا مخالف لمبدأ شخصية العقوبة .³²⁷

ج_ الغرامة كعقوبة فعالة وبديل لعقوبة الحبس قصير المدة عند القانون الليبي

(ا)_ مزايا عقوبة الغرامة

326 عبدالرحمن محمد ابوتوتة، أصول علم العقاب، 91-92. وما بعدها.

327 بالرغم مما تقدم من انتقادات اتجه المشرع الليبي الى اعتبار الغرامة ديناً مدنياً مقرر في المادة (463) اجراءات جنائية على انه اذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً تنفذ العقوبات المالية وما يجب رده والمصاريف في تركته ، واذ لم تقم ورثة المحكوم عليه بالسداد اختياراً فإنه يمكن التنفيذ عليهم بالطريق المدني ، الا ان التنفيذ عليهم بطريق الإكراه المدني غير جائز.

ووفقاً لهذا المعيار في القانون الليبي يحق لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل، وذلك طبقاً للمادة " 10 " من قانون الإجراءات الجنائية الليبي والتي تنص على أن يكون التنازل وفق الشروط التالية :

(1)_ لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل، وفي حالة تعدد المجني عليهم عددًا لا بأس به، فهذا لا يعتد بالتنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى .

(2)_ إذا توفى الشاكي، فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته، وذلك مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة،

بناءً على ما سبق يعرف التنازل على أنه إسقاط حق المجني دعواه بإرادته المنفردة دون إكراه، فهو عمل أحادي الجانب أو تصرف قانوني بالإرادة المنفردة، فلا يلزم لصحة التنازل عن الدعوى أو لإتمامها أن يصادفها قبول من جانب المدعى عليه، فالمدعى عليه ليس له أي مصلحة في رفض التنازل عن الدعوى، لأن التنازل عن الدعوى يمنع المدعي من رفع دعوى جديدة فلم يعد المدعى عليه يخشى من رفع الدعوى ضده من جديد، وحيث أن الباحث في هذا الصدد يدعم بحثه ويرفق أحكام صادرة عن المحاكم الليبية، دائرة الجرح والمخالفات والتي تختص بالجرائم المذكورة سابقاً، وكيفية انقضائها بالتنازل، ممن لهم الحق في أن يتنازلوا، سواء كان من قبل المتهم، أو كان من قبل الشاكي، كما أن الباحث يستدل على ذلك بما حكم به القاضي في الدعاوي الآتية في إحدى المحاكم الليبية كما هو مبين في الآتي :

يأذيها وذلك في أحد قولي الشافعية،³⁴² وقد قرر الفقهاء مشروعية الجمع بين الحبس تعزيراً وبين غيره من أنواع التعزير، ومن ذلك تقييد السفهاء والمفسدين في سجونهم وحبس من طلق في الحيض وضربه.³⁴³

أ_ مدة الحبس عند جمهور الفقهاء

حيث لمدة الحبس عند الفقهاء حد أدنى وحد أعلى، بحسب حال الجاني وجريته، والاصل أن تقدير مدة الحبس يرجع الى الحاكم مع مراعاة ظروف الشخص والجريمة والزمان والمكان، وقد أشار الزيعلي الى ذلك بقوله : ليس للحبس مدة مقدرة، وقال الماوردي : إن الحبس تعزيراً يختلف باختلاف المجرم، وباختلاف الجريمة فمن الجانبين من يحبس يوماً ومنهم من يحبس أكثر لي غاية غير مقدرة، لكن الشريبي من الشافعية ذكر أن شرط الحبس هي : النقص عن سنة كما نص عليه الشافعي في الإثم، وصرح به معظم الفقهاء، وأطلق الحنابلة في تقدير المدة.³⁴⁴

(أ)_ أقل المدة :

في كلام بعض الشافعية أن أقل مدة الحبس يوم واحد، وبالتالي يقصد به تعويق المحبوسين عن التصرف بنفسه، ليضجر وينزجر لأن بعض الناس تتأثر بحبس يوم فيعتم.³⁴⁵ حتى بالحبس عن حضور صلاة الجمعة، وقال آخرون أقل مدة الحبس يوم واحد أخذاً بالرأي الأول.³⁴⁶

342 حاشية ابن عابدين، 469 . والأشباه للسيوطي، 491 .

343 محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي، أحكام القرآن لابن العربي، المحقق : محمد عبد القادر عطا (لبنان : دار الكتب العلمية بيروت، ط3، 1424هـ، 2003م) 625.

344 فتح القدير، الجزء6، 375 . وحاشية ابن عابدين، الجزء 4، 326 . وتبصرة الحكام، الجزء2، 373. والأحكام السلطانية للماوردي، 224. ومغني المحتاج، الجزء 4، 192 . وكشاف القناع، الجزء4، 74-75 .

345 حاشية ابن عابدين، الجزء5، 384 .

346 محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخوة، القرشي، ضياء الدين، معالم القرية في طلب الحسبة، الجزء1 (دار الفنون كمبرج) 191 . وتبصرة الحكام، الجزء2، 329 .

ب)_ أكثر المدة :

جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة، لم يقدرُوا حدّاً أعلى للحبس بقصد التعزير، وفوضوا ذلك الى القاضي، فيحكم بما يراه مناسباً لحال الجاني، لأن التعزير فرع من فروع الحبس، مبنى على ذلك الى القاضي فيحكم بما يراه مناسباً لحال الجاني، فيجوز للقاضي استدامة حبس من تكررت جرائمه من أصحاب الجرائم الخطيرة، وللشافعية في هذا ثلاثة أقوال : أحداها للزبيري، وقدّر أكثر الحبس بستة أشهر، والقول الثاني وهو المشهور، وقدّر بسنة أو النفي المذكور بالحد، والقول الثالث لأمام الحرمين، والذي وافق فيه الجمهور في عدم تحديد أكثر المدة، وقد أجاز بعض الشافعية العمل بمذهب الجمهور على أن يكون الحامل على ذلك المصلحة لا التشهي والانتقام .³⁴⁷

ب_ التمييز بين الحبس القصير والحبس الطويل

ميز الفقهاء بين الحبس القصير والحبس الطويل، فسمى الفقهاء أقل ما كان من سنة حبساً قصيراً، وما كان سنة فأكثر حبساً طويلاً، وقضوا على أصحاب الجرائم الغير الخطيرة مثل التقصير في القيام بالواجبات العائلية بالحبس القصير ثلاثة أيام وقضوا على ذلك أصحاب الجرائم الخطيرة ومعتادي الأجرام بالحبس الطويل مثل حبس الزاني البكر سنة بعد الحد .³⁴⁸

ج_ سقوط الحبس عند جمهور الفقهاء

يقصد به توقيف تنفيذه بعد النطق به، سواء أبدى بتنفيذ بعضه أم لم يبدأ وأسبابه عند جمهور الفقهاء هي :

347 حاشية ابن عابدين، الجزء 4، 67 . وتبصرة الحكام، 148. ينظر لأحكام السلطانية للماوردي، 165 .

348 تبصر الحكام، الجزء 1، 266 . ينظر لأحكام السلطانية للماوردي، 222 . ينظر حاشية ابن عابدين، الجزء 4، 67 . ينظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى، 259. ينظر تبصرة الحكام في أصول الأفضية، 310 .

أ) الموت : ينتهي الحبس بموت الجاني لإنهاء موضع التكليف، ولا يتصور استيفاء الحبس بعد انعدام المحل.

ب) الجنون : يرى جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، على أن الجنون الطارئ بعد ارتكاب الجريمة، يستوجب إيقاف تنفيذ الحبس فيه، لأن المجنون ليس مكافئاً شرعاً، ولا أهلاً للعقوبة والتأديب، وهو لا يعقل المقصود من الحبس لفقده الإدراك.³⁴⁹ غير أن مذهب الحنابلة يرى : وهو قول أبي بكر الاسكافي من الحنفية أن الجنون لا يوقف تنفيذ الحبس، لأنه مرتكبها في وقت ارتكابها لم يكن لديه عارض أو مانع يمنعه من ذلك، وعللوا ذلك بأن الغاية من العقوبة التأديب والزجر، فإذا تعطل جانب التأديب بالجنون فلا ينبغي تعطيل جانب الزجر منعاً للغير.³⁵⁰

ج) العفو : إذا كان الحبس لحق آدمي سقط بعفوه، وضربوا مثالا على ذلك بالمدين المحبوس لحق الدائن.³⁵¹

د) الشفاعة: تجوز الشفاعة للمحكوم عليه بالحبس قبل البدء بتنفيذ الحكم، وذلك إذ لم يكن صاحب أذى، لما فيها من دفع الضرر،³⁵² ويجوز للحاكم رد الشفاعة إن لم تكن فيها مصلحة، وقد رد عمر رضي الله عنه الشفاعة في معن بن زائد حين حبسه لتزويره خاتمه، رغم أن هناك من يقول بأن الشفاعة ملك لله وحده لا تطلب إلا منه، وآخرين يقولون إن الله أعطى الشفاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم فقط ولأوليائه الصالحين دون غيرهم.³⁵³

349 الكساني، بدائع الصنائع، الجزء7، 63-64 . ينظر حاشية ابن عابدين، الجزء5، 378-426 . ينظر. حاشية القليوبي، الجزء3، 260 .

350 مرعي بن يوسف بن الكرمي، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى، المحقق: ياسر إبراهيم المزروعى ورائد يوسف الرومي، الجزء3 (1428هـ، 2007م)، 316 .

351 فتح القدير، الجزء5، 471 . ينظر .حاشية ابن عابدين، الجزء5، 388 .

352 حاشية القليوبي، الجزء4، 206 . ينظر .الأحكام السلطانية للماوردي، 237 .

353 المغني لابن قدامة، الجزء8، 325 .

ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي .³⁵⁹

وقال الشيخ أحمد الصاوي المالكي وأما التعزير بأخذ المال فلا يجوز إجماعاً .³⁶⁰

وقال الإمام العمراني الشافعي في معرض ذكره لأنواع المزكين إن أخفوا أموالهم حبسهم الإمام، فإذا ظهرت ففي القدر الذي يؤخذ منهم قولان :

أحدهما: قال في القديم يأخذ منهم الزكاة، وشطر من مالهم، عقوبة لهم، لما روى بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ومن منعها فإننا آخذوها، وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد فيها شيء)) .³⁶¹ والثاني : قد قيل في الحديث، تؤخذ منه الزكاة لا غير .³⁶²

وقال ابن قدامة الحنبلي: والتعزير يكون: بالضرب، والحبس، والتوبيخ، ولا يجوز قطع شيء منه، ولا جرحه، ولا أخذ ماله، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به .³⁶³

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

(أ)ـ بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ليس في المال حق سوى الزكاة، وأن العقوبات كانت في أول الإسلام في الأموال ثم نسخ ذلك .³⁶⁴

359 محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المختار على الدر المختار، الجزء 4 (لبنان : بيروت، دار الفكر، ط2، 1412هـ، 1992م) 61 .

360 محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، الفقه المالكي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الجزء 6 (دمشق : دار إحياء الكتب العربية، بدون تاريخ نشر) 370 .

361 جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، شرح السيوطي سنن النسائي، كتاب الزكاة، رقم الحديث 2444، 17 . وقد نقل عن الشافعي أن هذا الحديث لا يشتهه أهل العلم .

362 أبو الحسين يحيى الشافعي، البيان في مذهب الإمام الشافعي، 137 .

363 موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني الفقه المقارن، الجزء 12 (الناشر دار إحياء التراث العربي، ط1، 1405هـ، 1985م) 526 . (المتوفى 620هـ)

(ب) _ مذهب بعض فقهاء الحنابلة

أن العقوبة المالية " الجزاء المالي " جائزة، وللحاكم أمر تقديرها بحسب نوع المخالفة والظروف المحيطة بها. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة :

منها: مضاعفة الغرم على من سرق ما لا قطع فيه، كالحريسة، والثمر قبل أن يوضع في الجرين. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((ضالّة الإبل المكتومة غرامتها، ومثلها معها)) .³⁶⁵

الراجح والله أعلم أن ما ذهب إليه البعض هو الذي ينبغي المصير إليه إذا وجدت الضوابط التي ذكرتها قبل قليل، حيث مذهبهم هو الأقرب الى الصحيح وهذا بترجيح الباحث، وللباحث في هذا الصدد تعليان أو مدلولان وذلك لأمرين :

أحدهما: كثرة ما ورد من الأمثلة في التطبيق العملي للعقوبة المالية، من الآثار المرفوعة والموقوفة غير التي ذكرتها في معرض الاحتجاج لرأي البعض .³⁶⁶

ثانيهما : أن الحديث الذي احتج به الجمهور ضعيف من جهة سنده، ومن جهة أن المحذور الذي اعتمد عليه الجمهور إذا ضبط زال المانع. حيث قال الامام الغزالي : للولي أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه، والباحث لا يرجح هذا الدليل كون أن الضابط الذي احتج به الجمهور ضعيف ولا يرتقي لأن يصبح دليل .³⁶⁷

364 أخرجه ابن ماجة في باب الزكاة، رقم الحديث 1789 . وهو حديث ضعيف كما قال النووي والسيوطي وابن حجر وغيرهم. زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين، فيض القادير شرح الجامع الصغير، الجزء 5 (مصر : المكتبة التجارية الكبرى، ط1، 1356هـ) 374 .

365 نفس المرجع، 374 . أخرجه ورواه أحمد وأصحاب السنن، واللفظ لابن ماجة، رقم الحديث 640 . كما قال النووي في المجموع الجزء2، 360 . اتفق المحدثون على ضعف هذا الحديث واضطرابه.

366 محمد ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، 316 .

367 محمد ضياء الدين، معالم القرية في طلب الحسبة، نقلا عن الغزالي، 288 . (المتوفى 505 هجري)

أ. جدول مقارنة لمحل تلك العقوبات بين القانون الليبي والفقهاء الإسلاميين

محل العقوبة	من حيث القانون الليبي	من حيث الفقه الإسلامي
الحبس و مدة الحبس	ذهب القانون الليبي على عقوبة الحبس في التقصير في القيام بالواجبات العائلية لا تزيد عن سنة حيث ينص القانون الليبي بشكل عام على عقوبة الحبس بأن لا يجوز ان تتقصر اربع وعشرين ساعة ولا ان تزيد على ثلاث سنوات الا في الاحوال المخصوصة التي أقرها المشرع الليبي والمنصوص عليها قانوناً.	ذهب الشافعية على أن أقل مدة الحبس في جرائم التقصير في القيام بالواجبات العائلية يوم واحد وأكثره ستة أشهر أما عن المالكية والحنابلة والحنفية فلم يقدروا حداً أعلى وأدنى للحبس وهذا بخلاف القانون الليبي وفوضوا ذلك الى القاضي فيحكم بما يراه مناسباً لحال الجاني، وقد أجاز بعض الشافعية العمل بمذهب الجمهور على أن يكون الحامل على ذلك المصلحة لا التشهي والانتقام.
السلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة	عقوبة جريمة التقصير في القيام بالواجبات العائلية من العقوبات الأصلية التي أعطى لها القانون الليبي سلطة تقديرية للقاضي بالحكم بالعقوبة التي يراها مناسبة في حدود ما نص عليه القانون، وبذلك على القاضي أن يبين الاسباب التي تبرر تقديره، ولا يجوز له تعدي الحدود التي ينص عليها القانون لكل عقوبة بزيادتها أو إنقاصها الا في الاحوال التي يقرها القانون.	رجح فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة وما ذهب إليه بعضهم على تفويض القاضي في تحديد العقوبة ليحكم بما يراه مناسباً لحال الجاني، لأن الحبس يأخذ حكم التعزير ، وبالتالي نجد القانون الليبي لا يخالف هذا المبدأ ويتفق مع الشريعة الإسلامية في جواز سلطة القاضي في تحديد العقوبة لجرائم التقصير في القيام بالواجبات العائلية.

<p>يوقف تنفيذ الحبس في جرائم التقصير بالقيام بالواجبات العائلية عند جمهور الفقهاء إما بالموت أو الجنون الذي خالفه الحنابلة أو العفو أو الشفاعة، حيث أن العفو يأخذ حكم التنازل وهذا ما ذهب إليه القانون الليبي وبذلك لم يتطرق هذا القانون الى الجنون أو الشفاعة وغيرها.</p>	<p>يوقف تنفيذ الحكم بالحبس في جرائم التقصير في القيام بالواجبات العائلية وفق القانون الليبي بمجرد التنازل من طرف الشخص المتضرر وتسقط الدعوى بمجرد الحكم فيها بانقضائها وبذلك لا يصبح لها أي أثر قانوني.</p>	<p>وقف تنفيذ الحكم</p>
<p>ذهب جمهور الفقهاء الى عدم جواز عقوبة الغرامة في تلك الجرائم وهذا ما يخالف القانون الليبي بغض النظر عن مذهب الحنابلة الذي يرى أن العقوبة المالية جائزة وللحاكم أمر تقديرها بحسب نوع الجريمة التي قصر فيها ولي الامر الموصى عليهم والظروف المحيطة به.</p>	<p>أن قانون العقوبات الليبي اشترط الا تزيد عقوبة الغرامة عن خمسين جنياً في الجريمة التقصير في القيام بالواجبات العائلية، وتزداد هذه العقوبة الى النصف اذا سلب أو بذر الفاعل أموال ابنه القاصر أو من له ولاية عليه أو جرد من وسائل العيش أحد فروع وأصوله القاصرين والعاجزين عن العمل .</p>	<p>الغرامة</p>

ب. مناقشة الباحث لتحليل والنقد لتلك العقوبات

ينتقد الباحث النصوص الجزائية للقانون الليبي على عقوبة الحبس في التقصير في القيام بالواجبات العائلية، حيث يعتبر النص الدستوري "القرءان الكريم شريعة المجتمع" بمثابة التشريع للدولة، رغم أن القانون الليبي يحدد مدة الحبس بأن لا تزيد عن سنة بشكل عام وعلى أن لا ان تنقص عن اربع وعشرين ساعة، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات في احوال معينة.

غير أن جمهور الفقهاء، ومنهم ما ذهب اليه الشافعية يحددون بأن تكون أقل مدة الحبس في جرائم التقصير في القيام بالواجبات العائلية، يوم واحد وأكثره ستة أشهر، أما عن المالكية والحنابلة والحنفية فلم يقدروا حداً أعلى وأدنى للحبس وهذا بخلاف القانون الليبي وفوضوا ذلك الى القاضي، فيحكم بما يراه مناسباً لحال الجاني، وقد أجاز بعض الشافعية العمل بمذهب الجمهور على أن يكون الحامل على ذلك المصلحة لا التشهي والانتقام.

يستند الباحث على أقوال الفقهاء فيما يخص بتحديد مدة الحبس، لأنه جل القوانين الوضعية تكون مبنية على أمن تلك الدول، حتى أن مخالفتها للشريعة الإسلامية لا يعتبر من الأشياء الملزمة لها.

غير أن القانون الليبي يمتاز عن غيره في مسألة وقف تنفيذ الحكم بالحبس في تلك الجرائم، حيث بمجرد التنازل من طرف الشخص المتضرر تسقط الدعوى وبمجرد الحكم فيها بانقضائها لا يصبح لها أي أثر قانوني، وهذا ما يتشابه فيه القانون الليبي مع الرأي الراجح من أقوال الفقهاء، والذي يوقف فيه تنفيذ الحبس في تلك الجرائم إما بالموت أو الجنون أو العفو أو الشفاعة، وبذلك يأخذ العفو حكم التنازل وهذا ما ذهب اليه القانون الليبي تحديداً.

رغم أن السلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة وفق القانون الليبي تكون من العقوبات الأصلية التي أعطى لها المشرع الليبي سلطة تقديرية مطلقة للقاضي بالحكم بالعقوبة التي يراها مناسبة، في حدود ما نص عليه القانون، وبذلك ينتقد الباحث تلك السلطة المطلقة ويشد بأهمية النظر الى الاسباب التي تبرر تقديره، ولا يجوز له تعدي الحدود التي ينص عليها القانون لكل عقوبة بزيادتها أو إنقاصها الا في الاحوال التي يقررها القانون.

أما عن العقوبة الأخرى المتعلقة بجريمة التقصير في القيام بالواجبات العائلية والمتمثلة في عقوبة الغرامة، فيرى فيها الباحث إجحافاً للمحكوم عليه، وبهذا يرى الباحث بوجوب تعديل هذا النص من هذا القانون، استناداً الى الرأي الراجح من أقوال الفقهاء والذي يرى بعدم جواز تلك العقوبة في تلك الجرائم، بغض النظر عن مذهب الحنابلة الذي يرى أن العقوبة المالية جائزة وللحاكم أمر تقديرها بحسب نوع الجريمة التي قصر فيها ولي الامر والظروف المحيطة به.

هنا أيضاً يرى الباحث أن علاج النتيجة الإجرامية في النص السابق لم يكن بالشكل المطلوب، حيث أن المشرع نص على النتيجة الأيسر نسبياً واغفل عن النص القانوني الصريح، وفي هذا الصدد أشار الباحث إلى أن المشرع عندما اشترط صفة الجاني لوقوع الجريمة قد وسع من نطاق العقوبة فيما يتعلق بالأشخاص الذين قد شاركوا في ارتكاب الجريمة من غير الأصول كزوجة الأب وغيرها، ولا يركن بذلك المبادئ العامة التي قد تحمل الفاعل ممن لم تتوفر به صفة الجاني أو الاشتراك في الجريمة، وبالتالي يفلت الشخص من العقاب اذا أفلت الفاعل الأصلي الذي يستمد منه اجرامه.

حيث بذلك تكون صفة المجني عليه في هذه العقوبة إما متهمًا أو شاهداً، وبالتالي أن الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي، والذي وجد الباحث فيه بانه لا يكفي فقط اتجاه ارادة الجاني إلى التقصير في القيام بتلك الواجبات أو التعمد في ذلك، ولكن هذا لا يعني أن يكون اعتراف المتهم بالتقصير انه مذنب ويجب تنفيذ العقوبة عليه، حيث يمكن أن يكون التقصير نتيجة سوء الأوضاع المعيشية لرب الأسرة، أو يكون نتيجة سبب قاهر له خارج عن إرادته.

على مواد ظروف تشديد العقوبة بقولها إذا نتج عن الفعل أذى شخصي طبقت العقوبات المقررة في المواد " 379 " الى " 381 " مع خفضها إلى النصف .³⁷²

ويحلل هذا النص بتحديد ماهية تلك المواد وتكييفها القانوني، وتحديد ماهية الأذى الشخصي وعقوبته والتي تكون كالاتي :

(أ) _ فيما يتعلق بالمادة الأولى جريمة الإيذاء البسيط

تنص بأن : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً كل من أحدث بغيره أذى في شخصه، أدى إلى مرض، وإذا لم تتجاوز مدة المرض عشرة أيام، ولم يتوافر ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة " 382 " فلا يعاقب على الجريمة إلا بناءً على شكوى الطرف المتضرر .

من خلال تحليل هذه المادة يجد الباحث الفقرة الأولى منها تنص على عقوبة الحبس والغرامة، وهذا ما تم تحليله في المطلب الأول ولكن في الفقرة الثانية نجد أن القانون الليبي قد وضع لها شروط، وهي اذ لم تتجاوز المدة عشرة ايام ولم يتوفر ظرف من الظروف التشديد في المادة " 382 " فلا يعاقب على هذه الجريمة الا بناءً على شكوى الطرف المتضرر وتنص هذه المادة على أحوال وعقوبة وظروف التشديد بنصها : تزداد العقوبة بمقدار لا يتجاوز النصف إذا حصل الإيذاء المنصوص عليه في المواد 379 و 380 و 381 مع سبق الإصرار أو التردد أو باستعمال السلاح، أو إذا ارتكب الإيذاء ضد أحد الأصول .³⁷³

372 قانون العقوبات الليبي، الجرائم العامة، المادة (379) والمتعلقة بجريمة الإيذاء البسيط، والمادة (380) والمتعلقة بجريمة الإيذاء الجسيم، والمادة (381) والمتعلقة بجريمة الإيذاء الخطير.

373 نفس المرجع، المادة (379) من قانون العقوبات الليبي تنص على الإيذاء البسيط بقولها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً كل من أحدث بغيره أذى في شخصه أدى إلى مرض، وإذا لم تتجاوز مدة المرض عشرة أيام، ولم يتوافر ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 382 . فلا يعاقب على الجريمة إلا بناءً على شكوى الطرف المتضرر.

4_ عقوبة جرائم سوء استعمال وسائل الاصلاح أو التربية في منظور الفقه الإسلامي

من مزايا الفقه الإسلامي أنه تشريع واقعي يتعامل مع واقع البشر ويسع جميع تصرفاتهم بأحكامه المنصوصة في الكتاب والسنة، أو المستنبطة منهما بطريقه من طرق الاستنباط والاستدلال، وليس منهجاً صورياً بعيداً عن الواقع، ومن هنا وسعت قواعده وضوابطه كل جديد من الأحداث والتصرفات، وعمت بكليتها كل مكان وزمان.

أ)_ عقوبة السجن وطبيعته عند الفقه الإسلامي

السجن لغة : بالكسر على الموضع، وبالفتح على المصدر، ومادة السجن تدل على المنع،³⁷⁶ حيث قال الله تعالى في قصة سيدنا يوسف ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ .³⁷⁷

حيث أن أول من عرف السجن اصطلاحاً هو شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى قيل أن كل من أتى بعده نقل التعريف عنه، لكن الباحث في هذا الصدد يرى أن ابن حزم سبق ابن تيمية، حيث ذكر تعريف السجن في كتابه الاحكام فقال : السجن: منع المسجون من الأذى للناس أو من الفرار بحق لزمه وهو قادر على أدائه.³⁷⁸

376 هشام بن أحمد الوقشي الأندلسي، التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه، المحقق، عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الجزء 2 (بدون تاريخ نشر، ط1،) 33 .

377 سورة يوسف - الآية : 33

378 علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، الأحكام في أصول الاحكام، لمحقق، أحمد محمد شاكر، الجزء 2 (دمشق : دار الآفاق الجديدة، ط2، 1403هـ، 1983م) 462 . شيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى 728 هجري) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم (المتوفى 465 هجري) ينظر محمد بن عبد الله الجريوي، السجن وموجباته في الشريعة الإسلامية مقارناً بنظام السجن والتوقيف وموجباتهما في المملكة العربية السعودية، الجزء 1 (السعودية : جامعة الإمام الإسلامية، بدون تاريخ نشر) 37 .

1_ إعاقة المسجون عن التصرف المطلق بنفسه، وهذه الخاصية واضحة من تعريف السجن وواقعه، فإن السجن بأي إطلاق كان يلازمه المنع من التصرف بالنفس.

2_ الإهانة والإذلال في الظاهر، حيث دل العرف على أن السجن مكان للإهانة والذل الظاهر، ولذا قالت امرأة العزيز في قول الله سبحانه وتعالى ﴿ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ .³⁸¹ ولو لم يكن مكاناً للإهانة الظاهرة ما قابلته بالعمل الذي وصفته بالسوء، قال البقاعي: السجن سبب ظاهر في الإهانة .³⁸²

3_ منعه من مخالطة الآخرين مخالطة مطلقة ومنع الآخرين من مخالطته، حيث ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن نفي المحارب من الأرض : بأن السجن المشروع يتضمن منع المسجون من مخالطة الناس، ومنع الناس من مخالطته، ويعتبر بذلك رادعاً له، لأنه فيه إذلال للنفس، وبالتالي فإن توقيع مثل هذه العقوبة عليه من المحتمل أن تكون سبباً في شعورة بالندم نتيجة الفعل الذي أقره، ومن ثم تصبح رادعاً له في حالة ما إذا فكر في الرجوع لها مجدداً .³⁸³

ج)_ أنواع السجن عند جمهور الفقهاء

يمكن أن يقسم السجن إلى أنواع تبعاً لتعدد حيثيات التقسيم، فمن حيث كونه مقصوداً لذاته بوصفه عقوبة تعزيرية، أو كونه تمهيداً لعقوبة أخرى محددة شرعاً، ينقسم الى قسمين :

381 سورة يوسف - الآية : 25

382 البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، الجزء10 (لبنان : بيروت، دار الكتاب الإسلامي، 1404هـ، 1984م) م 79 .

383 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، المجلد 15، 311 .

في وجوب أن تكون عقوبة التعزير بديل من بدائل السجن، وتصل مدة عقوبة السجن في الشريعة الإسلامية الى المؤبد حسب جسامه الفعل.

يتفق الباحث مع القانون الليبي في كون المشرع حدد مدة السجن المؤبد بخمسة وعشرون سنة بخلاف القتل الغير العمد نتيجة اهمال أو تقصير وهي ثمانية سنوات، وتعتبر الخمسة والعشرون سنة من عمر الإنسان كافية لعقابه.

يرى الباحث بأن الفقه المعاصر الذي يحث على بدائل عقوبة السجن في الجرائم المتعلقة بالأسر هو الأقرب للترجيح باتفاقهم، كون البديل الوحيد للسجن التعزير، وبالتالي فإنها تتفرد بها والأصل فيها ثبوت شرعيتها إجمالاً من الكتاب والسنة والإجماع، حتى إن بعضهم قال أن السجن باب من أبواب المصلحة المرسله، وإذا استعملت عقوبة التعزير كبديل لعقوبة السجن لا حرج فيه إذ لم يكن عندهم في ذلك نص خاص قولي أو فعلي، وينتقد الباحث الفقهاء المعاصرين في كونهم لم يتطرقوا الى حجم نتيجة الفعل بخلاف القانون الليبي الذي نص ما اذا نتج عن الفعل الموت عوقب بثمانية سنوات.

الباحث يرى بأن المالكية والشافعية والحنفية لهم الرأي الراجح في أن الحكمة من شرع السجن في هذه الجريمة هي الحكمة من شرع العقوبات التعزيرية بصفة عامة، إذ تعتبر فرد من أفرادها، وجميع العقوبات إنما شرعت للمحافظة على نظام الكون بحفظ مصالح الخلق التي لا تقوم حياتهم إلا بإيجادها وتأمينها، ودفع الفساد والإفساد عنها، بخلاف الرأي الذي ذهب اليه الحنابلة، وبالتالي يستند الباحث على القول الراجح بأن عقوبة السجن في تلك الجرائم تعتبر من الوسائل الإصلاحية وليست من الأشياء المحتممة على كل حال.

(أ) - الدعوى و الحكم

رفعت هذه الدعوى أمام محكمة سبها الجزئية في ليبيا، بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأربعاء بتاريخ 20/3/2013 ميلادي، والتي قيدة برقم 2012/151 ميلادي، وكانت برئاسة القاضي أحمد المنزلي الهادي، وبحضور السيد هشام محمد أحمد ممثل النيابة العامة وبحضور كاتب الجلسة السيد محمد صالح المنوني والتي تتلخص وقائع هذه الدعوى في ثبوت الجرائم المنسوبة للمتهم وهو الزوج بأنه قد أساء معاملة أحد أفراد الأسرة، وهي الزوجة، معتدياً عليها بالضرب، مما نتج عن هذا الفعل إيذاء جسيم وبسيط لها، وإساءتها بألفاظ لا أخلاقية وهذا ما يسمى باتباع رب الأسرة مسلك يتنافى مع أخلاقها السليم، ومن خلال اطلاع المحكمة على أوراق الدعوى والوقائع المطروحة أمامها، وسماع المرافعة الشفوية تبين أن الجرائم المنسوبة للمتهم من الجرائم التي تتوقف على شكوى الطرف المتضرر وهي المجني عليها، وحيث أن المجني عليها في هذه الدعوة تقدمت بشكوى ضد المتهم، واتخذت الإجراءات القانونية بتحريك الدعوى حياله ورأت المحكمة أن الجاني ليس من أصحاب السوابق، وأن المجني عليها لها منه خمسة أطفال، حيث أن المحكمة رأت في إيقاف تنفيذ العقوبة فرصة للمتهم لمصالحة زوجته، ورعاية أطفاله والعيش معهم في كنف أسرهم خاصة في وجود الأطفال، حيث أن تنشئة الأطفال تكون أفضل في وجود الوالدين، ولهذه الأسباب وبتاريخ 20/3/2013 ميلادي.

حيث حكمت المحكمة باسم الشعب : غيابياً بإدانة المتهم عما نسب إليه بقرار الاتهام وقضت بمعاقبته بالحبس مدة ثمانية شهور وتأمراً المحكمة بوقف نفيذ العقوبة

6_ آراء العلماء والمفكرين في مسألة العقوبة في تلك الجرائم

إن الجرائم والعقوبات بجميع أنواعها والتي أقرتها القوانين الوضعية ينعكس مداها على العديد من الأشخاص، ولها من الآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية ما تأثر به على الفرد والأسرة والمجتمع، مما دفع بالكثير من العلماء والمفكرين إلى التوجه لتطبيق العقوبات البديلة عن السجن والحبس والغرامة وغيره، وخصوصاً عقوبة الفعل الذي يتنافى مع نظام الأسرة السليم، أو ما يسمى في بعض الأدبيات بعقوبة الجرائم المرتكبة على الأسر، وخاصة في الجرائم والمخالفات التي تقع لأول مرة، أو من الفئات العمرية الصغيرة؛ إلا أن التوسع في تطبيق هذه العقوبات البديلة لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن العقوبات الأصلية، حيث أن المجتمع الليبي مازال محدوداً، كونه لا توجد لائحة تنفيذه لمثل هذه العقوبات، وأن القضايا التي حكم فيها بعض القضاة على بعض الأشخاص بعقوبات بديلة إنما هو اجتهاد شخصي منهم .

قد كان للمفكرين والعلماء دور مهم في تفسير بعض النصوص في مسألة العقوبات مما انعكست إيجاباً على الواقع الاجتماعي، وبالتالي أصبحت تدور حول آراء القضاة والضباط والأخصائيين الاجتماعيين بخصوص تلك الجرائم والعقوبات الأصلية، حيث أن معظم القضاة في ليبيا لا يضعون العقوبات البديلة ضمن أولياتهم، بينما الضباط يضعون العمل لمصلحة المجتمع في المرتبة الثانية من الأوليات، بينما الأخصائيين الاجتماعيين يضعون عقوبة العمل لمصلحة المجتمع، في المرتبة الأولى للتفضيل على باقي العقوبات .³⁹⁰

390 عبدالله عبدالعزيز اليوسف، آراء القضاة والعاملين في السجون نحو البدائل الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية (السعودية : مؤسسة الملك خالد الخيرية، ط1، 2006م) 240-232 .

يرى المفكرين أن العقوبات المعاصرة والتي للقاضي سلطه تقديره فيها، لها من الميزات ما يجعلها رائدة، ومتفوقة على غيرها من العقوبات الأصلية، والتي تحمل في طياتها آثار اجتماعية ونفسية على الأسرة وعلى المجتمع الذي يعيش فيه الشخص، ويرى المفكرون أن لنجاح العقوبات البديلة في المجتمعات المعاصرة من الممكن أن يتحقق بها المنفعة العامة، وذلك مرهون بوجود نظام واضح للتنفيذ، والمتابعة، وكذلك وجود وعي ممن سوف تطبق عليه العقوبة، وأهم من ذلك مدى وعي وتقبل المجتمع لمثل هذه العقوبات، كون هذا الأمر يتطلب التعاون بين أفراد ومؤسسات المجتمع.

يرى الباحث بأن العلماء والمفكرين يأخذون بمعايير عند استنباط العقوبات الجديدة، ويراعى فيها آراء المختصين القضاة والعاملون بالمؤسسة الإصلاحية، والعاملون في اللجنة الوطنية لرعاية الأسر في تطبيق العقوبات الغير أصلية، لتحقيق المنفعة العامة ولو خالفت الشريعة الإسلامية في مضمونها .

حيث ومن أحد المفكرين، المفكر ثامر بن سعيد عبد الله الغامدي والذي يرى بأن الاتجاهات الحديثة في السياسة العقابية أصبحت تتماشى مع التغيرات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية السائدة في العالم، حيث عمدت كثير من الدول لتطوير وإلغاء بعض العقوبات السالبة للحرية، وخصوصاً ما يتعلق بالمسجونين لمدد قصيرة، أو في الجرائم المتعلقة بالأسر واستبدال عقوبة السجن إلى عقوبات أخرى، مثل: وقف تنفيذ الحكم، والعقوبات المالية، والتعهد والكفالة، والعمل للمنفعة العامة، وغيرها من العقوبات البديلة الأخرى .³⁹¹

حيث أن العقوبات السالبة للحرية وخصوصاً عقوبة السجن وغيرها من العقوبات المعمول بها في أغلب دول العالم، تعتبر في مضمونها من العقوبات التي لها آثار

391 ثامر بن سعيد عبد الله الغامدي، العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن دراسة اجتماعية ميدانية على عينة من المختصين ونزلاء المؤسسات الإصلاحية (السعودية : جامعة الملك عبد العزيز، 2015م) 3 .

سلبية على الفرد والأسرة وبالتالي على المجتمع وعلى الدولة ككل وتبين أن هذه العقوبات تعتبر عقوبات تقليدية ولها من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، نظرة السلبية دون النظر الى الشريعة الإسلامية.

ينتقد الباحث المفكر في كون أن العقوبات السالبة للحرية لم يعد يستعملها العالم تماشياً مع الواقع الحديث، ولكن إذا ما تأمل الباحث في القانون الليبي لوجد بأن تلك العقوبات مازالت هي السائدة في العالم، وخاصة في قانون العقوبات الليبي والمصري والجزائري وغيره، من قوانين الدول العربية، وهو ما تؤكد الإحصائيات المتعلقة بالوسط العقابي، ونظراً للسلبات المترتبة على هذه العقوبات تمثلت في تكس السجون للقاصرين، رغم أن زيادة إنفاق الدولة عليهم يؤثر سلباً عليها، إضافة لعدم جدوى الحد من تكرار العودة للجريمة للمساجين لفترات قصيرة، كل ذلك جعل هذه العقوبات قاصرة عما تهدف له السياسة العقابية الحديثة.

أما البعض الآخر من المفكرين فيرى في العقوبات بأنها مفهوم يجب أن يبحث عنه في الفكر القانوني الإسلامي المقارن وليس في أفكار حديثه ومعاصره تخالف المبدأ، والذي يكون يكون بعض العقوبات حق لله ولا يجوز تطويرها أو القاء التعديلات عليها بحجة تطور المجتمع، وهذا ما ذهب اليه المفكر، صبري محمد خليل، أستاذ الفلسفة بجامعة الخرطوم، حيث يرى بأن في القانون الجنائي الإسلامي قد وردت النصوص على العقوبات الحدية والقصاص ولا يمكن لأي شخص إدخال أفكار حديثه عليها، أما عقوبات التعزير الأخرى فلا بأس فيها لأنها لم ترد في الشرع، حيث للحاكم وحده من يقرر في الحكم بما يراه مناسباً في الجرائم التي لا حد فيها ولا كفارة ولا قصاص، حيث الفقه الإسلامي له العديد من القواعد التي تفيد حق الدولة في تبنى قواعد قانونيه معينة لتصبح ملزمة للناس.

الباب الخامس

النتائج والتوصيات

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، درس الباحث فيما سبق الجرائم الأسرية في القانون الليبي وكيفيةها في الفقه الإسلامي، وبين موقف قانون الأحوال الشخصية الليبي منها، ودرس الباحث أيضاً، العقوبات المترتبة عليها، من حيث الفقه الإسلامي والقانون الليبي الوضعي، واتضح للباحث من خلال التحليل والمقارنة أن هذه الجرائم والعقوبات المفروضة عليها من الأنظمة الوضعية ليست عادلة أحياناً، لأنها جاءت لتحمي نفسها بالدرجة الأولى ومن ثم مصالح الناس بالدرجة الثانية، وأثبت النظام الإسلامي التجربة الناجحة في تنظيم أحكام الجرائم والعقوبات سواء منها الأسرية أو غيرها، وامتاز بأن الأسس التي يقوم عليها كفيلة بأن تقضي على العيوب التي تصحب العقوبة الوضعية، كما هي كفيلة بأن توفر المجهودات التي تبذل لتخفيف أضرار هذه العقوبات والأموال الكثيرة التي تنفق في سبيل تنفيذها.

أ. نتائج البحث

1_ النتيجة المترتبة على السؤال الأول

أ)_ جريمة التقصير في القيام بالواجبات العائلية، إستنتج الباحث بأن هذه الجريمة تقع وفق القانون ما قبل بلوغ القاصر الى السن القانونية، وهذا ما يخالف الرأي الراجح في الفقه الإسلامي، الذي تتحقق فيها تلك الجريمة ما قبل وبعد سن البلوغ، ويعتبر واجباً على رب الأسرة الأنفاق على أبنائه في الحالتين، وعدم التقصير في حقهم.

(ب) - جريمة سوء إستعمال وسائل الإصلاح والتربية، حيث إستنتج الباحث بأن هذه الجريمة لا يعتد بها القانون الليبي، الا بعد النظر للنتيجة المترتبة على الفعل، وقيدتها بشكوى الطرف المتضرر، ويرى جمهور الفقهاء خلاف ذلك، بتجريم هذا الفعل وعدم الأخذ بشكوى الطرف المتضرر كنتيجة لهذا الفعل وذلك لكون المجني عليه قاصراً لم يبلغ سن الرشد.

(ج) - جريمة إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال، إستنتج الباحث بأن هذه الجريمة من الجرائم العمدية وفق القانون الليبي، والتي يتطلب لقيامها توفر القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة، وحيث ذهب جمهور الفقهاء على أن هذه الجريمة ليست من الجرائم العمدية، وهذا ما يخالف القانون الليبي، حيث لا يتطلب لتحقيقها تلك العناصر، ولا يتطلب لتوقيع العقوبات عليها سبق الإصرار والترصد.

(د) - جريمة التصرف في أموال القاصر وتبذيرها

استنتج الباحث أن القانون الليبي لا يجوّز للولي أو الوصي التصرف بأموال القاصر، سواء كانت محل نفع أو ضرر إلا بإذن من المحكمة، وذهب الرأي الأرجح من الفقهاء الذي يجوّز للولي أن يتصرف في مال القاصر بالمصلحة دون رقابة عليه في التصرفات النافعة نفعاً محضاً وهذا ما يعتبر القانون الليبي فيه مخالفاً للشريعة الإسلامية.

(هـ) - جريمة الامتناع عن دفع النفقة أو أجرة الحضانة بعد صدور حكم نهائي

توصل الباحث من خلال التحليل أن هذه الجريمة من الجرائم الجنائية التي لها وصف الجنائية، فلا يستطيع فيها المتهم أن يقدم كفيلاً عنه في سداد قيمة النفقة، ولا أن يقدم ضامناً، بخلاف ما ذهب اليه الرأي الراجح من الفقهاء الذي إذا امتنع المتهم

عن سداد النفقة بعد صدور حكم فإن المحكمة تأمر بحبسه على أن يخلى سبيله في أي لحظة يقوم فيها بالسداد أو بتقديم كفيل.

أما عن موقف قانون الأحوال الشخصية الليبي فهو لم يتطرق الى جميع تلك الجرائم بشكل خاص، وإنما تركها لقانون العقوبات " الجرائم العامة " في سن قوانين خاصة لها، الا في بعض المسائل، كتنظيم النفقة فلا يجرم فيها ولا يعاقب، وإنما كان مساعداً وسانداً وشارحاً لأحوالها وداعماً للقضاء في تحديد الوصف والتكيف القانوني لها.

2_ النتيجة المترتبة على السؤال الثاني

(أ)_ إستنتج الباحث بأن عقوبة جريمة التقصير في القيام بالواجبات العائلية من المفترض الا يأخذ بها قانون العقوبات الليبي، كونها لا ترتقي الى الجنايات، حيث تصل مدة العقوبة فيها الى الحبس، الذي لا يزيد عن سنة ولا ينقص على أربع وعشرين ساعة أو بغرامة مالية مقدرة، ولم يترك لقانون الأحوال الشخصية مجالاً للحد فيها، وهذا ما يخالف الرأي الراجح من فقهاء الفقه الإسلامي، حيث ذهب هذا الرأي الى عدم جواز العقوبة المالية " الغرامة " اطلاقاً، وذهب الرأي الراجح أيضاً، على أن أقل مدة الحبس في هذه الجريمة يوم واحد فقط، وأكثرها ستة أشهر.

(ب)_ عقوبة جريمة سوء إستعمال وسائل الإصلاح أو التربية، حيث تصل مدة عقوبة السجن في هذه الجريمة وفق القانون الليبي الى ثمانية سنوات، وهذا ما يخالف الشريعة الإسلامية، في كونها لا ترتقي الى الجرائم الجنائية، ولم يأخذ القانون بعقوبة التعزير كبديل على السجن، وإنما تركها لقانون الأحوال الشخصية، حيث أستند فقهاء الفقه الإسلامي على الرأي الراجح، الذي يأخذ بعقوبة التعزير، والتي جعلها بديل من

بدائل السجن في هذه الجريمة، حيث إذا نتج عن هذه الجريمة الموت، فللقاضي هنا سلطة تقديرية في تحديد الحد الأعلى والأدنى للعقوبة.

(ج) - عقوبة جريمة إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال، حيث إستنتج الباحث بأن قانون العقوبات الليبي أعطى للقاضي سلطة تقديرية بالحكم في مقدار العقوبة الأدنى والتي يراها مناسبة في رأيه عند وقوع هذه الجريمة، وجاء هذا الرأي موافقاً للمبدأ أو للرأي الراجح عند فقهاء الفقه الإسلامي، مع الأخذ بالمعيار الذي تنقضي فيه الدعوى بوقف تنفيذ الحكم فيها، ويكون ذلك بمجرد التنازل من طرف الشخص المتضرر، وعلى خلاف الرأي الراجح عند الفقهاء والذي يتم الوقف بتنفيذ الحكم فيها إما بالموت أو الجنون أو العفو أو الشفاعة.

ب. النظرية المترتبة على النتيجة

انتقد الباحث قانون العقوبات الليبي، كونه جعل الجرائم الأسرية جرائم جنائية تخالف الشريعة الإسلامية في بعض نصوصها، وبإدخالها تحت بند القانون الجنائي لحمايتها جنائياً، حيث من خلال المقومات التي أستند عليها الباحث في الإطار النظري، والمتعلقة بالوضع الاقتصادي للأسرة، وعدم اعتدال حجمها وعدم تكاملها، تبين للباحث فيها بأنها ارتكزت على عوامل مبنية على العرف والتقاليد الاجتماعية، وهذا ما يرى فيه الباحث بأن تلك الجرائم من المفترض أن تدخل تحت قانون الأحوال الشخصية الليبي، لأنه المشرع حين يحمي مصلحة ما داخل المجتمع، فإنه ينظر إلى مخالفة الفرد لواجبه في الطاعة والولاء لقانون الأحوال الشخصية، وليس لقانون الجرائم والعقوبات الجنائية، فالجرائم الأسرية تعتبر عصيان لأوامر قانون الأحوال الشخصية، وفي هذا يكمن تبرير تجريم المشرع لهذا الفعل أو ذلك الامتناع.

بالعمل القضائي وأطراف القضية المعروضة أمام ساحات القضاء فهم النصوص ومدى تطابقها على مع تلك الوقائع.

د) _ يوجه الباحث وزارة الشؤون الاجتماعية والقائمين عليها للعمل والاستفادة من الخبرات، وعقد اتفاقيات تعاون في هذا المجال، وما بين المنظمات المحلية والدولية تحت مظلة الواقع والبحث عن الحلول.

هـ) _ يوجه الباحث الى أن يكون هناك نوع من التعاون المنظم بين وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية و الأوقاف في هذا المجال من حيث ربط عملها بمنظومه موحد تظهر الإحصائيات لكل فترة زمنية داخل الدولة الليبية بحيث يتم من خلالها معرفة أهم المشكلات ونسبة الجرائم الأسرية من حيث الارتفاع والانخفاض وسبل معالجتها وتقديم أنسب الحلول لها بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.

أخيراً فإن هذا الموضوع، يعتبر من المواضيع المهمة التي تلامس حياة الناس وواقعهم، وهذا ما أتمنى أن يوفقني الله فيه، فما كان فيه من صواب فسيكون من الله، وما كان فيه من خطأ فسيكون من نفسي ومن الشيطان، وأشكر كل من لديه ملاحظة أو استدراك أو تقويم .

والله ولي التوفيق

تيمية، ابن. تقي الدين أبو العباس، مجموع الفتاوي، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد النجدي الحنبلي، ط2، مطابع المختار الاسلامية 1399م.

جدير، ماثيو، منهجية البحث، تتسيق محمد السيد غانم، باريس : بدون طباعة مترجم من الفرنسية للعربية.

جنزوري (ال)، سمير الجنزوري، شرح القانون الجنائي، مصر : المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 1967م.

جوهري (ال)، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجزء5، بيروت : دار العلم، ط4، 1407هـ، 1987م.

جريوي (ال)، محمد بن عبدالله الجريوي، السجن وموجباته في الشريعة الإسلامية مقارنةً بنظام السجن والتوقيف وموجباتهما، الجزء1، السعودية : جامعة الإمام الإسلامية.

جامي (ال)، محمد أمان بن علي الجامي، نظام الأسرة في الإسلام، السعودية : مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد 41.

جزيري (ال)، عبد الرحمن، الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء4، بيروت : دار الكتب العلمية، ط2، سنة 1424هـ، 2003م .

حوري، عمر محي الدين حوري، الجريمة أسبابها مكافحتها دراسة مقارنة في الشريعة والقانون والعلوم الاجتماعية، سوريا : دار الفكر دمشق، ط1.

حسد، ابن. العساف صالح، المدخل الى البحث في العلوم السلوكية، الرياض : مكتبة العبيكان، 1421هـ.

حسني، محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، مصر : دار النهضة العربية، ط5، 1982م.

حلس، داوود بن درويش، دليل الباحث في توضيح وتنظيم البحث العلمي في العلوم السلوكية، الرياض : إدارة التعليم، 2006م .

حمداوي (ال)، عبد الكريم مطيع، حد السرقة بين الفهم والتطبيق، مصر : دار المعارف.

حيلي (ال)، وهبة بن مصطفى الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، لبنان : دار الفكر المعاصر، ط2، 1418هـ.

حضيرى (ال)، سالمه محمد عبدالقادر، التوافق الزوجي وعلاقته بتنشئة الأطفال، رسالة ماجستير، ليبيا : جامعة سبها 2009م.

حديثي (ال)، فخري عبد الرزاق، قانون العقوبات القسم الخاص، العراق : مطبعة الزمان بغداد، 1992م .

حنفي (ال)، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على الدر المختار، الجزء4، لبنان : دار الفكر، ط1، 1412هـ، 1992م.

خليل، أحمد محمود، الوسيط في تشريعات محاكم الأسرة للمسلمين وغير المسلمين، مصر : المكتب الجامعي الحديث، 2008م.

خلاف عبد الوهاب، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، الكويت : دار القلم، 1970هـ .

خضر، عبدالفتاح، الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقهاء الإسلامي، السعودية : مطبعة معهد الإدارة العامة، 1985هـ.

خضر، أحمد إبراهيم، الملامح العامة للمنهج الوصفي، الجزء1، مصر : مطبعة الإسكندرية، 1434هـ.

- خطابي (ال)، أبو سليمان الخطابي، تحفة الأحوزي في شرح جامع الترمذي، المحقق، محمد راغب الطباخ، ط1، 1351هـ، 1932م.
- دراعم، محمد عبدالمنعم عطية، أثر الظروف في تخفيف العقوبة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، فلسطين : جامعة النجاح، 2006م.
- دراغمة، وسيم ماجد إسماعيل، الجرائم الماسة بالأسرة، رسالة ماجستير، فلسطين : جامعة النجاح، 2011م .
- دسوقي (ال)، محمد بن أحمد بن عرفة، الفقه المالكي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الجزء6، دمشق : دار إحياء الكتب العربية.
- دمشقي (ال)، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين دمشقي الحنفي، رد المختار على الدر المختار، لبنان : دار الفكر، ط2، 1412هـ، 1992م.
- دولة (ال)، عصمت سيف، العروبة والإسلام، سلسلة الثقافة القومية، الجزء6، سوريا : مركز دراسات الوحدة العربية.
- رمضان، عمر سعيد رمضان، بين النظريتين النفسية والمعياري والإثم، مجلة القانون والاقتصاد، 1964م.
- رازي (ال)، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، معجم اللغة العربية مختار الصحاح، مصر : دار الحديث، 1424هـ، 2003م.
- زريفة، رشا بسام إبراهيم، عوامل استقرار الأسرة في الإسلام، رسالة ماجستير، فلسطين : منشورات جامعة النجاح، 2010م.
- زير (ال)، ناريمان الزير، محامية صحيفة الثورة يومية سياسي، تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطبع والنشر والتوزيع، احكام الوصاية الشرعية.
- زرقا (ال)، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، الجزء1، دمشق : دار القلم، 1418هـ.

سباعي (ال)، عماد فتحي، النظرية العامة للأعذار المغفية في القانون الجنائي، رسالة دكتوراه، مصر : كلية الحقوق، 1986م.

سعدي (ال)، عبدالرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الجزء5، بيروت : دار ابن حزم، ط1.

سريتي (ال)، محمد أحمد، منهج البحث العلمي، الجزء1، السعودية : مكتب المروة للخدمات العلمية مكة المكرمة، 1436-1437هـ.

شمس الدين، محمد بن محمد الخطيب الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، بيروت : دار الفكر 1415هـ.

شلبي، محمد مصطفى شلبي، أحكام الاسرة في الاسلام، مصر، دار النهضة العربية، 1977م .

شاطبي (ال)، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، كتاب الموافقات، المحقق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الجزء1، بيروت : دار ابن عفان، ط1، 1417هـ، 1997م.

شاذلي (ال)، فتوح عبد الله، شرح قانون العقوبات، مصر : دار المطبوعات الجامعية، 2001م.

شافعي (ال)، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، المحقق، قاسم محمد النوري، السعودية : دار المناهج، ط1، 1421هـ، 2000م.

شافعي (ال)، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، مغني المحتاج الى معرفة معنى الفاظ المنهاج، الجزء1، بيروت : دار الكتب العلمية، 1445هـ، 1994م.

شرباصي (ال)، أحمد الشرباصي، المعجم الاقتصادي الإسلامي، بيروت : دار
الجيل، 1401هـ، 1988م.

شنقيطي (ال)، عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، نثر البنود على مراقي
السعود، الجزء2، السعودية : دار الملك فهد.

شاوي (ال)، سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات،
الكويت، مطابع الرسالة الكويتية، 1982م.

شوكاني (ال)، محمد بن علي، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، خزنة
الفقه الشافعي، كتب أدلة الأحكام، مصر : دار الحديث، ط1، 1413هـ، 1993م.

صغير، عبد الله بن علي، سيرة أئمة المذاهب السنية وأصولهم الفقهية، السعودية :
بدون سنة نشر وطباعة.

صيني، سعيد إسماعيل، قواعد أساسية في البحث العلمي، السعودية : شبكة
الألوكة، ط2، 2010م.

صلاحي (ال)، علي، الحركة السنوسية في ليبيا وسيرة الزعيمين محمد ادريس
السنوسي وعمر المختار، مصر: المكتبة العصرية، 1428هـ، 2007م.

صنعاني (ال)، محمد بن إسماعيل بن الأمير صنعاني، سبل السلام شرح بلوغ
المرام من أدلة الأحكام، المحقق، مصطفى الباز، الجزء3، مصر : مكتبة المعارف،
1427هـ، 2006م.

طبراني (ال)، أبو القاسم سليمان بن أحمد المعروف، المعجم الأوسط، مصر:
مكتبة المعارف، ط1، 1405هـ، 1985م.

عابدين، ابن. محمد أمين بن عمر ابن عابدين، فروع الفقه الحنفي رد المختار
على الدر المختار، الجزء5، بيروت : دار الكتب العلمية، 1412هـ، 1992م.

عبدالواحد، مصطفى عبدالواحد، كتاب الأسرة في الإسلام، مصر : مكتبة المتنبئ
القاهرة، ط1. 2006م.

عبيد، حسنين إبراهيم صالح، الوجيز في علم الإجرام والعقاب، لبنان : دار النهضة
العربية.

عبدالعزيز، سعد عبد العزيز، الجرائم الواقعة على الأسرة، تونس : الدار التونسية
للنشر، ط2. 2007م.

عبدالخالق، جلال الدين، الجريمة والانحراف الحدود والمعالجة، بيروت : دار
المعرفة الجامعية. 2003م.

عبدالله، نوري سعدون، العوامل الاجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمة، دراسة
ميدانية لأثر العوامل الاجتماعية التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة، العراق : كلية
الآداب قسم علم الاجتماع، منشورات جامعة الأبيار بمدينة الرمادي.

عبدالله، ذكريات أحمد، دور العائلة في الوقاية من الجريمة، دراسة ميدانية
البحرين: المركز الإعلامي الأمني، 2010م.

عبدالله، مرقس رابي، العوامل الأسرية للجريمة، دراسة ميدانية، بغداد : دار الرافدين،
1427هـ، 2006م.

عبدالواحد، مصطفى عبدالواحد، المجتمع الإسلامي، القاهرة : مؤسسة الكتاب
المصري، 1984م.

عبدالمنعم، سليمان عبدالمنعم، أصول علم الإجرام والجزاء، لبنان : المؤسسة
الجامعية للدراسة 1996م.

عطية، جمال الدين، التنظير الفقهي، الجزء1، الدوحة : مكتبة الإسكندرية، ط1،
1407هـ، 1987م.

عليان، رحي مصطفى، وعثمان محمد غنيم، مناهج وأساليب البحث العلمي، عمان : دار صفاء للطباعة، ط1، 2008م.

عتيبي (ال)، معجب بن معدي الحو يقل، حقوق الجاني بعد صدور الحكم في الشريعة الإسلامية، لبنان : مطبعة سفير، ط1، 1413هـ.

عدوي (ال)، محمد الخرشي أبو عبد الله علي العدوي، شرح الخرشي على مختصر خليل وبهامشه حاشية العدوي، سوريا : المطبعة الأميرية الكبرى، 1317هـ.

عربية (ال)، مجمع اللغة، المعجم الوسيط المعاجم والقواميس العربية، مصر : دار المعارف، ط1، 1992م.

عسقلاني (ال)، حمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، مصر : دار الريان للتراث، 1407هـ، 1986م.

عطايا، ابراهيم رمضان عطايا، فردية العقوبة وأثرها في الفقه الإسلامي، مصر : دار الفكر الجامعي، 2007م.

عمر، مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصر، المكتبة الشاملة، ط1، 1429هـ، 2008م.

عمارة محمود محمد، الحدود في الإسلام بين الوقاية والعلاج، مصر : مكتبة الإيمان المنصورة، ط1، 1419هـ، 1998م.

على، ابراهيم حسن، المصادر وطرق البحث، مصر : مكتبة النهضة الإسلامية، ط2، 1963م.

علوان، عبد الله ناصح، تربية الأولاد في الإسلام، مصر : دار السلام، ط5، 1406هـ، 1985م.

عواملة (ال)، نائل اساليب البحث العلمي، الناشر مكتبة احمد ياسين عمان : 1995م.

قانون العقوبات الليبي، الجرائم العامة، ليبيا : الجريدة الرسمية، 14 محرم
1373هـ، 1953م،

قليوبي، وعميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلى على منهاج الطالبين،
الجزء4، سوريا : مصطفى البابي الحلبي، ط3، 1375هـ، 1955م.

قاسم، محمد زكي الدين محمد، رجال ومناهج في الفقه الإسلامي، الأئمة الأربعة،
الكويت : مطابع الكويت. 2003م.

قدامة، ابن. موفق الدين عبد الله بن أحمد، المغني الفقه المقارن، الجزء12،
مصر : دار إحياء التراث العربي، ط1، 1405هـ، 1985م.

قيم، ابن. (ال) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، إعلام
الموقعين عن رب العالمين، المحقق : محمد عبد السلام إبراهيم، الجزء2، القاهرة :
دار الحديث، ط1، 1411هـ، 1991م.

قيم، ابن. (ال) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، الطرق
الحكمية، الكويت : مكتبة دار البيان.

قرطبي (ال)، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري
المتوفى 456هجرى، المحلى بالآثار، الجزء8، بيروت : دار الفكر. 1996م.

قرطبي (ال)، عبد الله محمد بن احمد الانصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن
المحقق، عماد زكي البارومي وخيري سعيد، الجزء5، المغرب : المكتبة التوفيقية.

قوسي (ال)، مناهج البحث التربوية بين النظرية والتطبيق، الكويت : مكتبة الفلاح
2012م.

قرشي (ال)، محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخوة، القرشي، ضياء
الدين، معالم القرية في طلب الحسبة، الجزء1، بريطانيا : دار الفنون كمبردج.

موسوعة (ال)، الحرة ويكيبيديا، شبكة المعلومات الدولية.

نووي (ال)، يحيي بن شرف أبو زكريا، شروح الحديث شرح النووي على مسلم،
الجزء 1، السعودية : دار الخير، 1416هـ، 1996م.

وريكات (ال)، محمد عبدا لله، أصول علمي الأجرام والعقاب، الأردن : دار وائل،
ط1، 2009م.

وسيط (ال)، مجموعة علماء المعجم، مجمع اللغة العربية، الجزء 2، مصر : دار
المعارف، 1393هـ، 1973م.

يوسف (ال)، عبدالله عبدالعزيز، آراء القضاة والعاملين في السجون نحو البدائل
الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية، السعودية : مؤسسة الملك خالد الخيرية، ط1،
2006م.

يسر، أمال عثمان، علم الأجرام والعقاب، لبنان : دار النهضة العربية ط1،
1980م.

Abdurrahman AlMuala, *Crime and Punishment in Islam*, (part 1 of
5): Published on 08 Mar 2006 , Last modified on 16 Oct 2011
Printed: 1836.

Glossary of Legal Terminology, *English – Arabic* , (472 words)
Ayman Khatib, *Arabic Interpreter and Translator*, Khalil Ansara,
Arkan Rule of Law Team in West Bank and Gaza.

Arkan supporting, rule of Law reform , *Quarterly Progress Report*
Arril – June 2007 ,Development. It was prepared by C hemonics
International Inc , *This publication was produced for review by the*
United States Agency for International.

Thomas Gary, *Education and theory*, strangers in paradigms.
(2007) Press.

Broken Families, *Dreams and Hopes*.Published By Authorhouse
.31-3-2017 .Patrick Conley. All rights reserved .

